

STRATEGI INDONESIA – JERMAN TERHADAP KEBERHASILAN
*“Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping
Globalisation and Sharing Responsibility”* PADA BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2012-2016



SKRIPSI

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Melaksanakan Penelitian Untuk Menyusun
Skripsi Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

Ulil Amri

4516023032

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Bosowa Tersebut di Bawah ini:

Judul Skripsi : STRATEGI INDONESIA-JERMAN TERHADAP
KEBERHASILAN "Indonesia-Germany Joint
Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation
and Sharing Responsibility" PADA BIDANG
PENDIDIKAN TAHUN 2012-2016

Nama : Ulil Amri

No. Stambuk : 4516023032

Program Studi : Hubungan Internasional

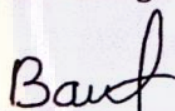
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Bosowa

Telah di periksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Makassar, Februari 2022

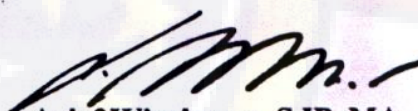
Menyetujui:

Pembimbing I



Beche Bt. Mamma, S.IP.,MA
NIDN: 0906 1282 03

Pembimbing II



Arief Wicaksono, S.IP.,MA
NIDN : 0927 1176 02

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial &
Ilmu Politik Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional




Arief Wicaksono, S.IP.,MA
NIDN: 0927 1176 02



Zulkhair Burhan, S.IP.,MA
NIDN: 0903 0481 01

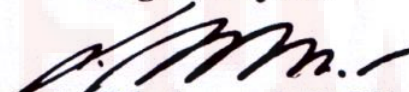
HALAMAN PENERIMAAN

Pada tanggal ini, Selasa Tanggal 22 Bulan Februari Tahun 2022 dengan judul **STRATEGI INDONESIA-JERMAN TERHADAP KEBERHASILAN “Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility” PADA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012-2016**

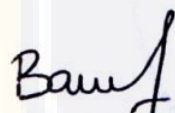
Nama : Ulil Amri
Nomor Stambuk : 4516023032
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pengawas Ujian :


Arief Wicaksono, S.IP.,MA

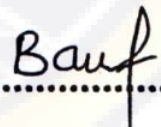
Panitia Ujian :


Beche BT. Mamma, S.IP.,MA
Ketua


Arief Wicaksono, S.IP.,MA
Sekretaris

Tim Penguji :

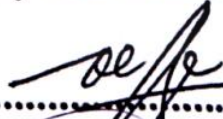
1. Beche BT. Mamma, S.IP.,MA


(.....)

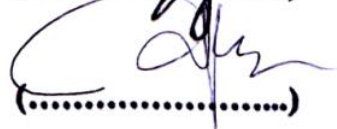
2. Arief Wicaksono, S.IP.,MA


(.....)

3. Zulkhair Burhan S.IP.,MA


(.....)

4. Muh. Asy'ari, S.IP.,MA


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Amri

No. Stambuk : 4516023032

Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bosowa

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi Indonesia-Jerman Terhadap Keberhasilan “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” Pada Bidang Pendidikan Tahun 2012-2016

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya, Pendapat ahli, dan rujukan lain (peneliti sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak maupun juga.

Makassar, Februari 2022

Penulis


Ulil Amri
4516023032

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya penulis diberi kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul:

**”STRATEGI INDONESIA-JERMAN TERHADAP KEBERHASILAN
“Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping
Globalisation and Sharing Responsibility” PADA BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2012-2016”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia, namun sejauh menulis mencoba usaha terbaiknya selama dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Harapannya, tulisan ini kedepannya mampu menebar kebermanfaatan baik untuk penulis pribadi terlebih bagi khalayak umum. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran serta dukungan motivasi dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tua yang Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat menemani penulis hingga kini, untuk ibu yang tak pernah henti mendoakan hal baik untuk penulis, selain membatu doa dan menjaga asupan nutrisi penulis, ibu juga yang banyak membantu memberi dukungan kepada penulis dalam Menyusun penulisan skripsi ini sebelum akhirnya penulis serahkan kepada pembimbing, penulis menyadari bahwa ibu mencoba usaha terbaiknya menjadi *support system* sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga ibu selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada ayah dengan caranya yang selalu memotivasi penulis dan hal itu membuat penulis merasa penuh cinta, terima kasih sudah bekerja keras memenuhi kebutuhan penulis di usia yang sudah tidak mudah lagi sehingga penulis tidak pernah merasakan kekurangan sedikitpun. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga penulis haturkan kepada orang-orang yang

saya hormati yaitu ibu Beche Bt. Mamma, S.IP M.A., selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Arief Wicaksono, S.Ip.,MA selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini, bapak Zulkhair Burhan, S.Ip.,MA. dan bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip.,MA. selaku dosen penguji. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
2. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa.
3. Untuk ibu Beche Bt. Mamma, S.IP M.A selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Arief Wicaksono, S.Ip.,MA selaku dosen pembimbing 2, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berguna bagi saya.
4. Untuk seluruh bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan arahnya selama ini.
5. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Untuk Neneng terima kasih atas segala motivasi dukungan bahkan paksaan yang membuat penulis semakin termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini.
7. Untuk teman-teman seperjuanganku yang merantau menuntu ilmu di Makassar, Wawan, Aan, Lode, Andra, Nanda, Kiki, Anti, Indra, Mira. Terima kasih selalu membantu penulis di kala susah maupun senang.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku Dandellion'16, Ical, Nasrun, Wahid, Fuad, Pute, Rezki, Arda, Hasan, Henry, Riri, Indah, Jaq, Ega, Moris, Pika dan lainnya mungkin yang tak sempat saya sebutkan Namanya , kalian semua berarti.
9. Untuk teman-teman SAMBE-TAUTOA
- 10.

10. Untuk teman-teman NGOPI.
11. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih selalu kuat, perjalanan masih Panjang, masih banyak yang perlu kamu bantu dan masih banyak tugas yang harus dikerjakan.

Semoga Allah ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu berharganya membantu penulis dalam proses mengerjakan skripsi. Skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pelajaran bagi penulis meminimalisir kesalahan kedepannya.

Makassar, Februari 2022

Penulis



Ulil Amri
4516023032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kerjasama Internasional.....	23
B. Kerjasama Internasional Indonesia – Jerman.....	29
C. Konsep Politik Luar Negeri	30
D. Perjanjian Internasional.....	36
E. Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman di Bidang Pendidikan.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM (KEBERHASILAN DEKLARASI INDONESIA-JERMAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN)	45

A. Kebijakan Indonesia-Jerman dalam Bidang Pendidikan.....	45
a. Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Jerman dan Indonesia	45
b. Sistem Pendidikan di Indonesia	50
c. Kebijakan Pendidikan di Jerman.....	53
B. Keberhasilan “ <i>Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility</i> ” dalam Bidang Pendidikan.....	57
C. Strategi Pengembangan Pendidikan Vokasi Indonesia-Jerman.....	61

BAB IV BAGAIMANA STRATEGI KERJASAMA INDONESIA – JERMAN TERHADAP KEBERHASILAN “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” PADA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012-2016.....

A. Pandangan Dua atau Lebih Kepentingan	67
B. Pandangan atau Harapan dari Suatu Negara	69
C. Persetujuan atas Masalah Tertentu antara Dua Negara.....	73
D. Aturan Resmi atau Tidak Resmi	76
E. Transaksi antar Negara.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perkembangan pendidikan mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, dilihat dari pola pikir pendidik yang menjadi semakin modern. Tujuan utama pendidikan Indonesia yaitu menciptakan individu yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai situasi. Untuk meningkatkan kemajuan sistem pendidikan Indonesia dalam ranah Internasional, Indonesia perlu meningkatkan rencana dalam bidang Pendidikan berhubungan dengan ranah Internasional. Salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan kerjasama Internasional dengan negara lain yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik. Jerman merupakan salah satu Negara di Eropa Barat yang paling maju dan menjadi pionir dalam inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan, Indonesia dan Jerman telah memutuskan untuk meningkatkan serta memperdalam hubungan bilateral melalui “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*”. Dalam pertemuan bilateral yang dimaksud, Indonesia mengusulkan untuk peningkatan kerjasama strategis di berbagai bidang, yaitu bidang investasi dan perdagangan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hukum dan konsuler, industri pertahanan, dan pers. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada strategi kerjasama Indonesia-Jerman pada bidang pendidikan.

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-eksplanatif. Dimana peneliti menggambarkan strategi Indonesia-Jerman terhadap keberhasilan deklarasi Jakarta pada bidang pendidikan. Dan pengembangannya hingga mencapai keberhasilan pada masing-masing negara mulai dari 2012 sampai 2016.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi Indonesia-Jerman terhadap keberhasilan deklarasi Jakarta pada bidang pendidikan. Kerjasama yang dilakukan Indonesia-Jerman sebagai strategi keberhasilan bidang pendidikan masing-masing negara dilihat teori yang dikemukakan oleh Hostly, yaitu pandangan dua atau lebih kepentingan, pandangan atau harapan dari suatu negara, persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara, aturan resmi atau tidak resmi, dan transaksi antar negara. Selain itu, Jerman menjadi salah satu negara Eropa yang memiliki kekuatan fundamental ekonomi kuat dengan ekspor utama berupa mesin, semen, bahan-bahan kimia, pesawat terbang, manufaktur, sehingga menjadi alasan yang kuat Jerman menjadi negara yang efektif dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kerjasama Internasional, Deklarasi Jakarta, Pendidikan*

ABSTRACT

The development of education has undergone significant changes from year to year, seen from the mindset of educators who are becoming increasingly modern. The main goal of Indonesian education is to create individuals who have quality and character so that they have a broad view and are able to adapt quickly and precisely in various situations. To improve the progress of the Indonesian education system in the international sphere, Indonesia needs to improve plans in the field of education in relation to the international sphere. One of the strategies used to improve the quality of education in Indonesia is to conduct international cooperation with other countries that have better quality education. Germany is one of the most advanced countries in Western Europe and a pioneer in technological and scientific innovation, Indonesia and Germany have decided to enhance and deepen bilateral relations through the "Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalization and Sharing Responsibility" . In the bilateral meeting, Indonesia proposed to increase strategic cooperation in various fields, namely investment and trade, health, education, culture, law and consular affairs, defense industry, and the press. In this study, the researchers focused on the strategy of cooperation between Indonesia and Germany in the field of education.

The method that the researcher uses in this research is descriptive-explanative method. Where the researcher describes the Indonesian-German strategy for the success of the Jakarta declaration in the field of education. And its development to achieve success in each country starting from 2012 to 2016.

The result of this research is the Indonesia-Germany strategy towards the success of the Jakarta declaration in the field of education. The cooperation carried out by Indonesia-Germany as a strategy for the success of the education sector of each country is seen by the theory put forward by Hostly, namely the views of two or more interests, views or expectations of a country, agreement on certain issues between two countries, official or unofficial rules, and transactions between countries. In addition, Germany is one of the European countries that has strong economic fundamentals with main exports in the form of machinery, cement, chemicals, aircraft, manufacturing, so that is a strong reason for Germany to be an effective country in advancing education in Indonesia.

Keywords: *Education, International Cooperation, Jakarta Declaration.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Federal Jerman sudah terjalin sejak tahun 1952. Jerman merupakan salah satu Negara di Eropa Barat yang paling maju dan menjadi pionir dalam inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Jerman menjadi salah satu negara Eropa yang memiliki kekuatan fundamental ekonomi yang kuat dengan ekspor utamanya berupa mesin, semen, bahan-bahan kimia, pesawat terbang, manufaktur, dan masih banyak lagi. Berawal dari kesejahteraan dan kekuatan ekonomi Jerman, pada akhirnya mampu untuk meningkatkan berbagai fasilitas dengan kualitas yang terbaik pada berbagai bidang. Hubungan diplomatik ini pertama kali diresmikan melalui Kantor Perwakilan RI di Bonn, Jerman Barat yang dibangun pada saat itu dan kemudian menjadi Kedutaan Besar RI di Bonn tahun 1954. Adapun tujuannya dari program kerjasama pembangunan bilateral tersebut yaitu untuk mempertimbangkan kepentingan regional dan global di Indonesia sendiri. Bersamaan dengan Brasil, India, Afrika Selatan dan Meksiko. Indonesia juga turut menjadi mitra pembangunan global, kerjasama pembangunan dengan Jerman (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Dalam meningkatkan kerjasama Internasional Indonesia-Jerman menjadi momentum yang kuat bersamaan dengan kunjungan Presiden Republik Federal Jerman, Dr. Christian Wulff ke Indonesia Pada 30 November-2 Desember 2011 menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman di tahun

2012. Indonesia dan Jerman telah menentukan untuk meningkatkan serta memperdalam hubungan bilateral melalui “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” (Deklarasi Jakarta, 2012). Jakarta Deklarasi adalah kerjasama Indonesia dan Jerman dalam bentuk agenda global yang tersusun untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara. Kerjasama Internasional ini diharapkan saling mendapat keuntungan dan bertanggung jawab untuk masalah global yang menjadi perhatian serta kepentingan bersama (Karomah, 2017). Kerjasama Internasional antara dua negara tersebut membahas isu-isu fundamental bagi hubungan antarnegara dan memprioritaskan pada bidang kerjasama di masa yang akan datang. Dalam pertemuan bilateral yang dimaksud, Indonesia memberikan usulan untuk peningkatan kerjasama yang strategis di berbagai bidang, yaitu bidang investasi dan perdagangan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hukum dan konsuler, industri pertahanan, dan pers (Karomah, 2017).

Pada Deklarasi Jakarta 2012, ada 8 bidang kerjasama (*areas of cooperation*) yang menjadi fokus utama hubungan antara Indonesia-Jerman, yaitu bidang kesehatan; pasar, investasi dan pembangunan; politik; pertahanan dan kerjasama keamanan; sains dan teknologi; mekanisme pemantauan; lingkungan, perubahan iklim, kehutanan, dan energi terbarukan; *people-to-people contact*; dan pendidikan, sosial dan budaya (Deklarasi Jakarta, 2012).

Yang menjadi fokus utama untuk menunjang pembangunan Indonesia adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional, oleh karena itu peran pemimpin untuk dunia pendidikan pada suatu negara sangat

penting untuk menentukan arah dan implementasi kebijakan pendidikan. Hal yang sangat diperhitungkan masyarakat Indonesia terkhusus oleh pemerintah, adalah upaya menjadikan negara Indonesia yang memiliki masyarakat dengan jumlah besar dalam mutu sumber daya manusianya. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah terkait turunnya kualitas pendidikan (Getteng, 2011).

Pendidikan Indonesia terbilang memiliki pendidikan yang cenderung rendah. Ini terjadi karena minimnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan, sementara pendidikan dianggap penting untuk memajukan negara. Hal ini karena pendidikan adalah modal dasar untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Kesenjangan pada pendidikan di Indonesia terbilang sangat besar, apalagi mengenai kualitas pendidik. Sebagai pendidik harus memiliki tempat strategis dalam usaha mencapai kualitas pendidikan yang semakin baik berdasarkan kemampuan profesionalnya. Skill dan profesionalitas perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan global (Triatmodjo, 2013).

Masalahan lain yang menjadi pokok utama di Indonesia ialah masih adanya skill mismatch yang cukup besar, yaitu kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki para lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Tingkat skill mismatch di Indonesia tetap diangka 51%. Jadi sangat sulit bagi industri untuk menemukan tenaga-tenaga kerja dengan kualifikasi yang mereka perlukan. Bangsa ini mau tidak mau harus

melakukan perbaikan dan pembaharuan disegala sektor yang berkaitan dengan pendidikan (Sayekti, 2018).

Pada perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung, Indonesia membutuhkan tenaga ahli khususnya dalam sektor teknik tertentu agar pembangunan dapat tersebar ke seluruh sektor. Pendidikan teknik seperti kejuruan memang telah menjamur di seluruh Indonesia, akan tetapi minim sarana SDM yang berkualitas, Indonesia dianggap membutuhkan sokongan negara lain seperti Jerman dalam membantu melahirkan teknisi-teknisi berbakat yang kemudian hari turut serta menjadikan Indonesia sebagai negara maju (Yarnis, 2015).

Indonesia juga mempunyai kepentingan nasional bertepatan dengan hubungan bilateral tersebut yaitu transfer ilmu kejuruan (*vocational education*). Kerjasama tersebut terbentuk berdasarkan rencana Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Berlin. Prof. Agus Rubiyanto yang mempunyai keinginan untuk menganjurkan masyarakat agar belajar tentang kreativitas serta inovasi melalui pendidikan kejuruan. Jika semakin ditingkatkan, kemitraan strategis tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan negara Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintahan Jerman juga mempunyai kepentingan nasional di Indonesia yaitu untuk memperluas bahasa Jerman di luar negaranya sendiri. Hal ini menjadi pemicu utama terjalannya kerjasama antara pemerintah negara lain untuk mengembangkan peran Jerman dalam susunan pendidikan dan aksinya secara langsung melalui pengajaran yang diberikan melalui jaringan budaya (Utama, 2016).

Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman memiliki dampak positif bagi kedua negara, Khususnya pada sektor pendidikan di Indonesia yang pengaruhnya meningkat secara signifikan. Dengan terjalannya kerjasama Internasional melalui Deklarasi Jakarta 2012, Jerman dapat memperluas penggunaan Bahasa Jerman di banyak sekolah dan universitas di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menerima banyak bantuan dana dan tenaga ahli dari Jerman untuk pembangunan Negara dan SDM yang lebih baik. Dengan kerjasama Internasional ini, Jerman juga memfasilitas bagi pelajar Indonesia berupa beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Jerman. Keberhasilan kerjasama ini Jerman menjadi satu dari tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melakukan studi di Jerman (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018).

Dalam upaya penambahan beasiswa dan dana untuk pelajar dari dua Negara melalui DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) dan Beasiswa Darmasiswa. Hasil dari pemberian beasiswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah
2008	18
2009	6
2010	10
2011	19
2012	19
2013	12
2014	13
2015	17

Sumber: Kemendikbud, 2015.

Penelitian sebelumnya oleh Yarnis (2015) tentang analisa implementasi deklarasi Jakarta 2012 antara Indonesia-Jerman dalam sektor transportasi, pendidikan, dan lingkungan (periode 2012-2014) menunjukkan bahwa kerjasama Internasional Indonesia-Jerman di bidang Pendidikan dapat dikatakan menguntungkan kedua Negara dalam hal pembangunan dan pengembangan negara. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karomah (2015) dengan kerjasama pertahanan Indonesia-Jerman melalui Deklarasi Jakarta tahun 2012-2016 yang mengajukan bahwa Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman dapat saling menguntungkan dan bertanggung jawab untuk permasalahan global, serta dapat mengembangkan berbagai bidang di antar Negara, khusus di sektor pertahanan dan pendidikan .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada sektor pendidikan, dilihat dari strategi kerjasama yang dibangun dan pengembangannya hingga mencapai keberhasilan pada masing-masing negara mulai dari 2012 sampai 2016.

B. Batasan Masalah

Hubungan antara Indonesia dengan Jerman sudah lama terjalin selama 60 tahun. Namun, pada tahun 2012, Indonesia dan Jerman menerbitkan Deklarasi Jakarta dalam 8 bidang kerjasama (*areas of cooperation*) yang untuk memperkuat hubungan antar kedua negara. Penulis memfokuskan penelitian ini pada strategi kerjasama Indonesia-Jerman terhadap keberhasilan “*Indonesia-Germany Joint*

Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility” pada bidang pendidikan tahun 2012-2016

C. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi kerjasama Indonesia – Jerman terhadap keberhasilan “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” pada bidang pendidikan dan pelatihan vokasi tahun 2012-2016?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui strategi kerjasama Indonesia-Jerman dalam menyinergikan perjanjian deklarasi Jakarta yang diterapkan dalam bidang pendidikan pada tahun 2012-2016.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis tulisan ini semoga mampu menjadi bahan rujukan bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional terlebih isu pendidikan dalam rana HI, isu pendidikan dalam rana HI masih belum mendapat perhatian khusus oleh para penstudi HI,
- b. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam tulisan ini adalah hasil penelitian yang diperoleh nantinya sanggup memperluas wawasan mengenai fungsi dan kajian Ilmu Hubungan Internasional yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian ini dapat diterima sebagai diskusi untuk lebih memajukan studi ini dalam ranah Hubungan Internasional.

- c. Kegunaan pragmatis penelitian ini ialah agar dapat memenuhi tugas akhir skripsi strata-1 jurusan Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Makassar dalam melihat strategi Indonesia - Jerman terhadap keberhasilan deklarasi jakarta tahun 2012-2016 pada bidang pendidikan.

E. Kerangka Konseptual

Penulis juga menggunakan teori dan konsep yang relevan dalam mengkaji penerapan kerjasama Indonesia-Jerman melalui perjanjian deklarasi Jakarta 2012 yang diterapkan dalam bidang pendidikan pada tahun 2012-2016. Konsep yang digunakan terkait fenomena yang dikaji ialah konsep kerjasama internasional yang merujuk dari Kalevi Holtsi, dimana mengemukakan bahwa terdapat lima indikator kerjasama internasional yaitu:

1. Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai-nilai tujuan yang saling bertemu dapat menimbulkan hasil yang dapat dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu dalam mencapai kepentingan masing-masing negara.

3. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan bersama.
5. Transaksi antar Negara dilakukan untuk memenuhi tujuan kedua belah pihak diantara negara terlibat.

Konsep kerjasama Internasional menurut Smith, Michael, dan Hocking (1990), dimana mengemukakan bahwa terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

1. Consensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara Negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara Negara-negara yang terlibat.
2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari consensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara Negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dan memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara Negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang terjadinya benturan kepentingan diantara Negara-negara terlibat (Smith, Michael, dan Hocking, 1990)

Kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak mendasari pada kekerasan atau apksaan dan disahkan

secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional yaitu PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulisasi-regulisasi, norma-norma, dan tata cara pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418-419).

Menurut K. J Holsti, kerjasama Internasional dapat diefenisikan sebagai berikut.

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka (K. J Holsti, 1995).

Hal ini, Indonesia-Jerman melakukan kerjasama Internasional guna berbagi visi dalam membentuk agenda global yang terstruktur dengan tuntutan memajukan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan serta memberikan dampak positif dan bertanggung jawab dalam memecahkan permasalahan global yang menjadi perhatian serta kepentingan kedua negara.

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan Negara menurut Holsti (1995), yaitu:

1. Dengan alasan demi memajukan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain. Untuk meminimalisir biaya yang di tanggung oleh negara tersebut dalam memproduksi satu produk kebutuhan bagi masyarakatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Adanya permasalahan yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatife yang disebabkan lantaran tindakan-tindakan invidual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (K. J Holsti,1995).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Holsti terkait alasan terjalannya kerjasama Internasional, momentum kerjasama Internasional antara Indonesia dan Jerman semakin kuat bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Federal Jerman, Dr. Christian Wulff ke Indonesia Pada 30 November-2 Desember 2011 menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman di tahun 2012. Indonesia dan Jerman telah menentukan untuk meningkatkan serta

memperdalam kerjasama Internasional melalui “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” (Deklarasi Jakarta, 2012). Deklarasi Jakarta merupakan kerjasama Indonesia dan Jerman dalam bentuk agenda global tersusun untuk mengembangkan hubungan antar kedua negara. Kerjasama Internasional ini diharapkan saling memberi dan bertanggung jawab untuk permasalahan global yang menjadi perhatian serta kepentingan bersama (Karomah, 2017). Kerjasama Internasional antara dua negara tersebut membahas isu-isu fundamental bagi kerjasama antarnegara dan prioritasnya pada bidang kerjasama di masa yang akan datang. Dalam pertemuan bilateral yang dimaksud, Indonesia memberikan usulan untuk meningkatkan kerjasama strategis di berbagai bidang, yaitu bidang investasi dan perdagangan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hukum dan konsuler, industri pertahanan, dan pers. Hal yang menjadi titik fokus utama untuk menunjang pembangunan Indonesia adalah sektor pendidikan (Karomah, 2017).

Kerjasama internasional pada umumnya berlaku pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi persoalan yang menyangkut memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Hubungan dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan keadaan berbagai institusi yang demikian belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam

teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini (Compas.com, 2019).

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Majunya teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya kerjasama yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Keadaan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat menyebabkan kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Peralihan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam gambaran kerjasama internasional.
4. Dengan adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu cara kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi dapat memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Compas.com,2020)

Manfaat secara global Indonesia melakukan kerjasama internasional menurut Bintang (2014), yaitu:

1. Menjaga kemerdekaan bangsa dan memepertahankan keselamatan negara
2. Mendapatkan barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memajukan kemakuran rakyat apabila barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri.

3. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia mampu membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan kesejahteraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah Negara RI
5. Menjadikan suatu kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan internasional dalam mempertinggi saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integrasi wilayah pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
6. Menyusun struktur kerja yang lebih fokus dan tindak lanjut terciptanya pembentukan organisasi *security economic sociocultural community*.
7. Memantapan kerjasama internasional di sektor ekonomi, perdagangan, social dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan social ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk millennium development goals (MDGs).
8. mampu memberikan fasilitas jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara menyeluruh.
9. Mampu menambah fasilitas untuk memperluas susunan jaringan dan peningkatan pemanfaatan Sister City antar kota-kota dan propinsi di indoneisa dengan kota-kota dan propinsi/distrik di mancanegara yang sudah berkembang dan maju.

10. Upaya peningkatan penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, pencurian uang, kejahatan narkoba, penyulundupan dan perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang berlaku secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
11. Memperbanyak keikutsertaan dalam menciptakan perdamaian dunia
12. Berusaha menanggulangi ketinggalannya dengan bantuan serta kerja sama dengan negara maju
13. Kemajuan kekuatan militer.
14. Dapat menjelaskan dalam menanggulangi penyulundupan manusia yang modus memiliki kesamaan diantara satu negara dengan negara yang lain
15. Peningkatan kerjasama di sektor pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam sektor pertanian
16. Dapat menginvestasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi
17. Meningkatkan perekonomian negara
18. Menciptakan lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat (Bintang, 2014).

Kerjasama internasional terjadi karena adanya *national understanding* serta mempunyai kesamaan tujuan, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama tersebut didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara. Sifat kerjasama internasional biasanya beragam, seperti harmonisasi hingga intergrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama

demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak cocok ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua negara bekerjasama dalam kepentingan dan permasalahannya (Gamedia.com, 2021).

Terciptanya hubungan internasional antar kedua negara tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antar negara. Masing-masing negara menjalin kerjasama tersebut tidak lepas dari kepentingan nasional dalam usaha menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing, dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa:

“Hubungan kerjasama yang terjadi antar dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara.

Kepentingan nasional adalah unsur yang sangat beresiko yang mencakup kelngsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan ekonomi”(Moergenthau & Thompson, 1990).

Pendidikan merupakan salah satu aspek sangat terpenting dalam majunya suatu negara. Pendidikan merupakan pembentuk karakter bangsa. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan pendidikan dapat membuat kehidupan menjadi lebih sejahtera. Perkembangan zaman saat ini telah menuntut setiap warga negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam kanca global (Deepublish).

Banyak permasalahan yang telah diupayakan Indonesia dalam memperbaiki pendidikan dalam negeri. Hal tersebut dapat membuktikan dari upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk seluruh bangsa Indonesia dengan penyediaan fasilitas yang dapat mendukung program tersebut. Adapun yang lain yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satunya dengan melakukan hubungan dengan negara lain. Sadar akan kemampuan dalam negeri yang terbatas, Indonesia pun gencar berupaya bekerjasama dengan banyak negara dalam hal pendidikan. Salah satu negara yang menjadi mitra Indonesia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri adalah Jerman (Deepublish).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Eksplanatif, dimana peneliti menggambarkan implementasi kerjasama Indonesia-Jerman dan keberhasilan perjanjian deklarasi Jakarta yang diterapkan dalam bidang pendidikan pada tahun 2012-2016 kemudian menjelaskan dan mencari penyebab serta faktor yang mempengaruhi hubungan Indonesia-Jerman yang diterapkan dalam bidang pendidikan pada tahun 2012-2016.

2. Jenis Dan Sumber Data

Penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dengan mempelajari artikel, buku-buku, website,

jurnal, majalah, karya ilmiah dan akses internet yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini ialah telaah pustaka (library research). Penulis melakukan penelusuran data melalui internet (browsing) dengan cara menelusuri berbagai literature seperti buku elektronik, buku pelengkap, majalah dan terbitan berkala, jurnal ilmiah, bulletin, dan dokumen resmi untuk memperoleh bahan atau data sehubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan analisa kualitatif, dengan menganalisa studi perbandingan, studi kasus, analisis wacana, content analysis, analisa terhadap pernyataan pemegang otoritas (pejabat atau ahli), dan kutipan dari sumber-sumber kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan pembanding serta pelengkap dalam penelitian penulis akan menyertakan beberapa literature terdahulu yang membahas seputar keberhasilan kerjasama internasional Jerman-Indonesia pada sektor pendidikan dalam ranah HI serta pengaruh keberhasilan kerjasama internasional tersebut terhadap masing-masing Negara. Dalam penelitian, penulis akan mencoba menganalisa upaya yang dilakukan Indonesia dan Jerman dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing negara dilihat dari hubungan kerjasama internasional Indonesia-Jerman melalui Deklarasi Jakarta 2012-2016. Merujuk kepada literatur yang ada, diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi penulis, baik untuk melengkapi penelitian ini maupun sebagai referensi.

Pertama, ditulis oleh Kharomah dalam jurnalnya “*Kerjasama pertahanan Indonesia-Jerman melalui Deklarasi Jakarta tahun 2012-2016*” yang mengemukakan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama di berbagai sektor khususnya pendidikan yang disepakati pada february 2012, maka Indonesia dan Jerman telah menjalin kerjasama semakin baik, keputusan Indonesia bekerjasama dengan Jerman bukan tanpa alasan melainkan karena Jerman dinilai mumpuni dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan Indonesia dalam bidang Pendidikan (Kharomah, 2017).

Kharomah dalam tulisannya tentang kerjasama Indonesia-Jerman melalui deklarasi Jakarta tahun 2012-2016 menggunakan konsep perspektif Neorealisme.

Konsep neorealisme adalah perimbangan kekuatan, pengulangan internasional, dan konflik internasional. Penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan teori kepentingan nasional. Kerjasama Internasional terbentuk karena adanya permasalahan kehidupan internasional mencakup berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Kharomah, 2017).

Teori Kepentingan Nasional menurut Daniel S. Papp untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu Negara beberapa kriteria dapat digunakan seperti:

1. Kriteria ekonomi: berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkat posisi ekonomi Negara dianggap sebagai kepentingan nasional.
2. Kriteria ideologi: memengaruhi Negara untuk mengadops cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan melihat kepentingan negaranya.
3. Akumulasi *Power*: melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer.
4. Keamanan militer: kepentingan di antara negara ada pada upaya untuk mengushakan keberlangsungan hidup masyarakat dan keamanan nasionalnya (Daniel S. Papp).

Yarnis menjelaskan hasil penelitiannya yang berjudul “*Analisis implementasi deklarasi Jakarta 2012 antara Indonesia-Jerman dalam bidang transportasi, pendidikan, dan lingkungan (periode 2012-2014)*” menggunakan konsep hubungan bilateral. Menurutnya, telah menjadi cabang dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara bahwa setiap masyarakat di dunia ini menjalankan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu kerjasama internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terwujudnya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Berikut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral, yakni suatu bentuk kerjasama diantara Negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan fokus utamanya untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi (Yarnis, 2015).

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep hubungan bilateral adalah sebagai berikut :

“hubungan bilateral merupakan keadaan yang menunjukkan dengan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak” (Didi Krisna,1993)

Hubungan bilateral yang dimaksud merupakan kerjasama di bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan keamanan. Namun dalam penelitian tersebut membahas kerjasama bilateral yang terfokus pada kerjasama yang teramat dalam Deklarasi Jakarta 2012 (Yarnis, 2015).

Yarnis dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komitmen Indonesia-Jerman dalam meningkatkan hubungan internasional semakin meningkat dalam Deklarasi Jakarta 2012. Deklarasi Jakarta 2012 memuat delapan bidang kesepakatan kerjasama kedua Negara untuk semakin meningkatkan kerjasama di

seluruh sektor, salah satunya bidang Pendidikan. Secara umum, deklarasi Jakarta 2012 sudah terimplementasi sejak diresmikan khususnya dalam sektor pendidikan (Yarnis, 2015).

Dalam penelitiannya, Yarnis menemukan bahwa pada sektor pendidikan, banyak universitas di Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai universitas di Jerman khususnya pada jurusan teknik. Selain itu, Indonesia juga menerima bantuan mengirimkan mahasiswa dan tenaga pengajar untuk dapat melakukan studi di Jerman. Indonesia dan Jerman juga menyetujui pengembangan pendidikan kejuruan di Indonesia. Meski masih berupa wacana, namun hal tersebut menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam negeri (Yarnis, 2015).

Isri dalam jurnalnya "*Konsep pendidikan Jerman dan Australia: Kajian komparatif dan aplikatif terhadap mutu pendidikan Indonesia*" menjelaskan bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah faktor utama ketertinggalan Negara Indonesia, artinya dengan melihat pola atau system pendidikan di Jerman, kiranya dapat termotivasi dan dapat mengevaluasi dari sejumlah kekurangan sehingga kedepan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik, karena selain sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya perlu melakukan kajian yang sama dengan mempelajari dan mengkomparasikan pendidikan Indonesia dengan Negara lain yang dalam hal ini adalah Jerman dimana kualitas pendidikannya sangat baik di Dunia (Isri, 2015).

A. Kerjasama Internasional

Selain disiplin ilmu atau bidang studi yang mempelajari objek tertentu pasti memiliki konsep-konsep dasar yang membedakannya dengan bidang studi lain, karena konsep sendiri adalah abstraksi atau siplikasi dari suatu kejadian atau kumpulan fakta-fakta empiris yang sejenis. Dengan demikian hubungan internasional sebagai sebuah studi memiliki konsep-konsep mendasar yang menjadi ciri khasnya. Salah satu yaitu, kerjasama (cooperation). Kerjasama antar Negara (international cooperation) telah menjadi perhatian sejak kelahiran Hubungan Internasioanal sebagai disiplin akademis (Bakry, 2017).

Menurut Teuku May Rudy, dalam bukunya, *teori, etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*, adalah kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur yang sangat jelas dan lengkap serta diharapkan mampu diproyeksikan untuk berlangsung serta melakukan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang harapkan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda (Rudy, 1993)

Pujiastuti, Tamtomo, dan Suparno menjelaskan bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dibuat untuk mendukung perjuangan melawan segala bentuk pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama internasional biasanya dilakukan antar satu Negara dengan Negara lain, dengan memilki tujuan bersama dan saling menguntungkan pihak yang bersangkutan

namun tetap berpedoman dengan kebijakan politik, ekonominya (Pujiastuti, Tamtomo, dan Suparno, 2017).

Menurut salah satu pakar dan sarjana HI yaitu Kalevi Holtsi (Bacry, 2017), menurut beliau kerjasama internasional dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut :

6. Pandangan dua atau lebih kepentingan, nilai-nilai tujuan yang saling bertemu dapat menimbulkan hasil yang dapat dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
7. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu dalam mencapai kepentingan masing-masing negara.
8. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
9. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan bersama.
10. Transaksi antar Negara dilakukan untuk memenuhi tujuan kedua belah pihak diantara negara terlibat (Kalevi Holtsi, 1993)

Setiap Negara yang menjalani Kerjasama Internasional tentunya mengharapkan dampak baik sehingga memiliki tujuan dari pelaksanaan kerjasama internasional tersebut. Ada beberapa tujuan dari dilaksanakan kerjasama internasional menurut Bacry (2017), yakni

1. Untuk mencakup kebutuhan nasionalnya.
2. Meningkatkan perekonomian Negara.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Memperluas lapangan pekerjaan.
5. Meningkatkan pendapatan Negara dengan kegiatan ekspor.
6. Memperkuat hubungan persahabatan dengan Negara lain (Bacry, 2017)

Berdasarkan asal Negara peserta, kerjasama internasional terbagi menjadi tiga bagian, ada kerjasama bilateral, multilateral dan regional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kerjasama internasional menurut Sofiah, Yudhistira, dan Ardiansyah yaitu :

1. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua Negara.
2. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua Negara yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional, dalam kerjasama multilateral, biasanya Negara-negara maju memiliki kekuatan langsung dibandingkan dengan Negara kecil. Misalnya, kerjasama Negara-negara yang tergabung dalam PBB.
3. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar kedua Negara yang berada atau terletak dalam satu kawasan tertentu. Misalnya, ASEAN kerjasama antar Negara dikawasan Asia Tenggara (Sofiah, Yudhistira, dan Ardiansyah, 2009).

1. Faktor-faktor Penyebab Kerja Sama Antarnegara

Ferdiawan, menjelaskan bahwa setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu Negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar kedua belah pihak sebagai berikut:

a. Kerjasama antar-negara akibat adanya perbedaan

Berikut ini perbedaan-perbedaan yang mendorong kerja sama antarnegara.

1) Perbedaan sumber daya alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara berbeda-beda baik dari segi jenis jumlahnya. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga Negara yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Contohnya Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun Negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian Negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan Negara yang kaya akan bahan baku industri, supaya kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi dengan adanya kerjasama antar negara (Ferdiawan, 2014).

2) Perbedaan iklim

Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antar satu Negara dengan Negara lain akan mengakibatkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya Indonesia dan beberapa Negara lain yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi dan lahan yang subur dapat menghasilkan padi, kopi, the, karet, dan

sebagainya. Sedangkan Negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut (Ferdiawan, 2014).

3) Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan antara satu Negara dengan Negara lain tidak sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman mempunyai kemampuan dalam mengatasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bandingkan Negara-negara berkembang seperti di Africa, dan sebagian Negara Asia. Adanya kesenjangan tersebut, Negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan Negara-negara maju. Dengan demikian Negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya (Ferdiawan, 2014).

4) Perbedaan ideologi

Perbedaan ideologi antar suatu wilayah Negara dengan Negara lain dapat memicu konflik antarnegara bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan perlu adanya kerjasama, sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya Negara seperti Hongkong yang memisahkan diri dengan RRC yang berideologi komunis, sangat ingin melakukan kerjasama dalam bidang politik dengan Negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Kerjasama antarnegara akibat adanya kesamaan

Berikut ini beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antarnegara:

1) Kesamaan sumber daya alam

Kesamaan sumber daya alam diantara beberapa Negara dapat mendorong terbentuknya hubungan antarnegara. Misalnya beberapa Negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).

2) Kesamaan keadaan wilayah (kondisi geografis)

Negara-negara yang berada di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang mirip sering melakukan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing Negara. Misalnya Negara-negara yang terletak diwilayah Asia Tenggara membentuk hubungan melalui organisasi ASEAN, dan sebagainya.

3) Kesamaan Ideologi

Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu Negara untuk melakukan kerjasama. Sebagai contoh NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah kerjasama Negara-negara yang tidak memihak pada blok Barat dan blok Timur membentuk kerjasama dalam organisasi Non-blok.

4) Kesamaan agama

Adanya persamaan agama dapat mendorong beberapa Negara untuk masuk kedalam organisasi. Misalnya OKI (Organisasi Konferensi Islam), adalah kelompok organisasi Negara-negara islam. Mereka bergabung dalam OKI sebagai respon atas kejadian pembakaran Masjid Al Aqsa di Yerusalem yang dilakukan oleh Israel (Brainly.co.id, 2020).

B. Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman

Hubungan perdagangan Jerman – Indonesia bisa dijumpai sejak abad ke-19. Sebagai contoh tujuh tahun setelah Siemens didirikan di Jerman pada tahun 1854, rumah Siemens sudah lama aktif di Surabaya. Selain itu Indonesia juga memainkan peran yang tidak bisa diacuhkan dalam sejarah kesusasteraan dan seni Jerman pada abad ke-19. Pelukis Indonesia Raden Saleh (1807-1880) mengabadikan perkembangan seni di Dresden (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Indonesia melakukan hubungan dengan Negara lain tidak lepas dari kepentingan nasional Indonesia yang salah satunya adalah melakukan pembangunan dalam negeri demi meningkatkan kualitas negaranya dan demi *prestise* di dunia Internasional. Untuk itu, Indonesia sangat membutuhkan pihak lain untuk membantu pembangunan dalam negeri. Selain itu mencapai kepentingan bersama kedua Negara tertuang dalam Deklarasi Jakarta 2012, Indonesia juga berusaha untuk mencapai hal yang diinginkan demi menunjang pembangunan dalam negerinya (Yarnis, 2015).

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman memiliki unsur pemaknaan kerjasama. Dan dalam kerjasama yang dilakukan, ada bentuk saling tukar pikiran antara kedua Negara dimana tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan melainkan kedua belah pihak mendapat hal yang mereka inginkan dan mencapai satu kesepakatan bersama. Jerman pun pasti memiliki motivasi tersendiri jika mereka melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia, begitu pula sebaliknya (Yarnis, 2015).

C. Konsep Politik Luar Negeri

Politik pada hakikatnya adalah *action theory* atau kebijakan suatu Negara yang ditujukan ke Negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan menunjukkan kepentingan nasional didalam peraturan dunia Internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu keinginan yang baik dalam konteks negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu Negara didalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Yarnis, 2015).

Salah satu aturan untuk mengetahui konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen yakni politik dan luar negeri. Politik merupakan perihal keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik itu sendiri berakar pada konsep pilihan (*choices*). Memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemikiran mengenai kedaulatan dan konsep wilayah membantu upaya memahami konsep politik luar negeri (Yarnis, 2015).

Proses ini diperlukan agar dapat membedakan antara politik luar negeri dan politik domestik. Tidak dapat dibayangkan bahwa pembuatan politik luar negeri selalu terkait dengan konsekuensi yang berada di dalam negeri. Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat menyatakan "*foreign policy begins when domestic policy ends*". Dengan kata lain

studi politik luar negeri berada pada persimpangan antara aspek internasional dari kehidupan suatu Negara. Karena hal tersebut studi politik luar negeri tidak dapat menafsirkan struktur dan proses baik dari sistem politik domestik. Dengan demikian sulit bagi kita untuk memisahkan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri. Pemisahan ini hanya dimungkinkan untuk keperluan analisis atau penelitian dalam hubungan internasional (Hanrieder, 1971).

Politik luar negeri adalah salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri adalah studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal tetapi juga aspek-aspek internal suatu Negara. Negara sebagai suatu actor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam system hubungan internasional. (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976).

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai *input* yang mengakibatkan politik luar negeri suatu Negara dipersepsikan oleh para pembuat kebijakan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu Negara ini mengacu pada pemaknaan keadaan, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan pertimbangan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan fasilitas yang dimilikinya (Rosenau, 1973).

Kebijakan luar negeri adalah suatu strategi yang dibuat oleh pembuat kebijakan Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituliskan

dalam terminolog kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999). Kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah suatu Negara memang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada ditentukan oleh siapa yang lebih berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut, Negara-negara maupun aktor dari Negara melakukan berbagai macam hubungan kerjasama diantaranya ialah kerjasama bilateral, triteral, regional dan multilateral (Mas' oed, 1994).

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri adalah upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk menindak lanjuti dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu Negara (Rosenau, 1973).

Sementara pendapat Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua aspek tindakan serta aktivitas Negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya mendapatkan keuntungan dari lingkungan tersebut serta menghiraukan akan berbagai keadaan internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (Holsti, 1992).

Tujuan poliitik luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari proses dimana tujuan Negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi dari sasaran yang dilihat oleh masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Salah satu ujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas dasar jangka panjang, jangka menengah, dan jangka

pendek. Pada dasarnya tujuan jangka kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan.

Sementara itu Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ikhwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional (Plano & Olton, 1999).

Tujuan politik luar negeri dapat diartikan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu Negara dimana pemerintah melalui para perumus kepentingan nasional mampu mengsebarluaskan pengaruhnya kepada Negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan Negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri mampu bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan mampu pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu Negara yaitu:

- a. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.

- b. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Tipe tuntutan yang diajukan suatu Negara kepada Negara lain (K.J Holsti, 1992).

Bangsa Indonesia dalam membina kerjasama dengan Negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri bebas dan aktif dapat dimaknai bebas dalam memilih apapun dan tidak terikat oleh satu ideologi, blok kekuatan dunia, atau oleh suatu politik Negara asing yang tergabung dalam kelompok atau blok kekuatan tertentu dan aktif berpartisipasi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Berbicara mengenai konteks nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri.

Dalam konteks bilateral, Indonesia berupaya untuk menetapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Negara-negara sahabat, dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan kerjasama bilateral dengan Negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya menciptakan kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan dalam konteks global, kebijakan luar negeri Indonesia disarankan untuk mendukung upaya-upaya PBB dalam menyelesaikan bermacam masalah dunia yang menjadi kepentingan bersama masyarakat Internasional.

Kepentingan nasional Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Kementerian Luar Negeri yang disebut sebagai “Sapta Dharma Caraka”, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah maupun kedaulatan Indonesia.
2. Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan dan ekonomi promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi.
3. Meningkatkan tindakan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif Asia-Pasifik, mendirikan kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta kaitannya antar semua Negara berkembang.
4. Memeperdalam hubungan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme.
5. Meningkatkan gambaran Indonesia di masyarakat internasional sebagai Negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia untuk mencapai pengakuan dari negara lain.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta mempermudah diplomasi kemanusiaan guna menyokong tanggap darurat dan rekontruksi Aceh dan Nias dari bencana dan gempa tsunami.

7. Melanjutkan membenahi diri untuk meningkatkan kapasitas organisasi, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015)
8. Terdapat beberapa poin “Sapta Dharma Caraka” yang sesuai dengan kepentingan Indonesia terhadap Jerman. Berdasarkan seluruh kebijakan yang dijelaskan, butir yang berkaitan antara lain butir dua, tiga, dan empat. Jadi kesimpulannya ialah bahwa hubungan Indonesia dengan Jerman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam praktek politik luar negeri Indonesia dalam upaya mencapai kepentingan nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015)

Sedangkan politik luar negeri Jerman jika dilihat dari isi Deklarasi Jakarta 2012 tersebut, Jerman ingin membuka peluang kerjasama terhadap ASEAN untuk UE dan Jerman sendiri. Indonesia merupakan salah satu Negara yang cukup memiliki peluang besar di ASEAN, oleh karena itu Jerman yang juga memiliki pengaruh cukup besar di Uni Eropa menginginkan jalannya semakin terbuka untuk bergabung dengan ASEAN melalui peningkatan kerjasama bilateral dengan Indonesia.

D. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan menyepakati ataupun konvensi merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu subjek atau masalah tertentu dengan

maksud dan tujuan untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang dipegang oleh hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat unsur-unsur perjanjian internasional, adalah kata sepakat, subjek hukum internasional, dan objek perjanjian. Mengenai subjek hukum internasional dalam pengertian tersebut tidak dikatakan secara terang-terangan siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Oleh sebab itu, saat ini tidak semua subjek hukum internasional dapat menjadi pihak perjanjian internasional dapat menjadi pihak perjanjian internasional. Hanya Negara, tahta suci, dan organisasi internasional, kaum belligerensi, bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional (Parthiana, 2002).

Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat dirumuskan perjanjian internasional dalam ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu:

“kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional (Negara, tahta suci, kelompok, organisasi internasional) mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.” (Parthiana, 2002)

Arti dari perjanjian internasional tersebut menjadi lebih sempit dengan membatasi mengenai subjek hukum internasional dan bentuk kebijakan. Pengertian tersebut menyatakan secara tegas subjek hukum internasional yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Subjek hukum internasional tersebut merupakan Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional

dapat juga sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional sehingga akan lebih muda dimengerti jika pengertian perjanjian internasional dibagi dalam dua macam yaitu perjanjian internasional antarnegara yang berbeda serta pengertian perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional atau antaror-ganisasi internasional (Parthiana, 2002).

Kemudian pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional memberikan pengertian perjanjian internasional antar Negara, yaitu suatu proses persetujuan internasional yang diadakan antar Negara-negara dalam gambaran yang tertulis dan diurus oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling bersinggungan tanpa memandang apapun itu.

sedangkan Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Antara Negara dan Organisasi Internasional dan Perjanjian antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional menjelaskan pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis:

1. Satu atau lebih Negara dan satu atau lebih organisasi internasional
2. Sesama organisasi internasional, baik persetujuan itu berupa satu instrument atau lebih dari satu instrument yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya.

Kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang sama dengan pengertian perjanjian internasional sebelumnya. Akan tetapi pada kedua pengertian terakhir,

ruang lingkup kebijakannya menjadi lebih sempit, dengan memisahkan pokok pembicaraan hukum yang dapat menjadi lebih sempit, dengan memisahkan subjek hukum yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian internasional.

Parthiana (2002) menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka dapat jelaskan beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian internasional, yaitu:

1. Kata Sepakat

Kata sepakat adalah unsur yang esensial dari perjanjian internasional. Tanpa ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka tidak akan ada persetujuan yang terjadi. Kata sepakat inilah yang kemudian dimasukkan kedalam pasal-pasal perjanjian.

2. Subjek-subjek Hukum

Subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum internasional yang terikat pada syarat-syarat perjanjian, contohnya Negara (termasuk Negara bagian, sepanjang konstitusi Negara federal yang bersangkutan memungkinkan hal tersebut), tahta suci, organisasi internasional, kaum belligerensi, dan bangsa yang sedang bererjuang untuk haknya. Pada perjanjian internasional yang bersifat terbuka dapat dimungkinkan bahwa pihak yang melakukan perundingan belum tentu menjadi anggota dalam kebijakan tersebut, sedangkan pihak yang tidak terlibat dalam proses perundingan kemudian menjadi peserta perjanjian. Situasi ini seringkali terjadi kepada pihak yang melakukan perundingan kemudian menyatakan sikap untuk tidak terikat pada persetujuan tersebut.

3. Berbentuk Tertulis

Bentuk tertulis ialah perwujudan dari kata setuju yang otentik dan mengikat para pihak, dengan merumuskan dalam Bahasa dan tulisan yang dimengerti dan disetujui para pihak yang berkaitan. Melalui bentuk tertulis, akan menjamin adanya ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Melalui bentuk tertulis, akan menjamin adanya ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga yang mungkin pada suatu hari akan terikat pada perjanjian tersebut.

4. Objek Tertentu

Objek dari suatu perjanjian internasional ialah objek atau keadaan tertentu yang diatur di dalamnya. Setiap objek itu secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut.

5. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional

Yang dimaksud adalah baik hukum internasional pada kebanyakan hukum internasional pada khususnya (hukum diplomatik, Hukum Laut Internasional, dan sebagainya). Secara umum, suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Demikian pula sejak dilakukan perundingan hingga dinyatakan persetujuan terhadap perjanjian tersebut, seluruhnya tunduk pada hukum perjanjian internasional (Parthiana, 2002).

Parthiana (2002) menjelaskan bahwa deklarasi diartikan sebagai pernyataan atau pengumuman. Deklarasi digunakan untuk menunjukkan

kepada kesepakatan antara pihak yang bersifat umum dan berisi mengenai hal-hal yang pokok saja. J.G Starke membedakan deklarasi ke dalam empat macam, yaitu :

- a. Deklarasi merupakan perjanjian dalam arti sebenarnya
- b. Instrument tidak formal yang ditambahkan pada suatu perjanjian sebagai penjelasan
- c. Persetujuan informal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak begitu penting
- d. Resolusi yang terlahir dalam suatu konferensi diplomatic yang berisi beberapa macam pernyataan tentang prinsip yang harus dihormati (Parthiana, 2002).

Perjanjian internasional menjadi sumber utama hukum internasional mengikat para pihak. Perjanjian internasional menganut prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang menjelaskan bahwa perjanjian internasional yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Dengan terikatnya Negara peserta terhadap perjanjian internasional, maka Negara anggota memiliki kewajiban untuk mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut.

Jika dilihat dari jumlah peserta, Deklarasi Jakarta 2012 masuk dalam perjanjian bilateral dimana deklarasi tersebut dilakukan oleh Jerman dan Indonesia saja. Dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada Negara-negara untuk menjadi anggota dalam perjanjian internasional. Deklarasi Jakarta 2012 termasuk perjanjian internasional khusus atau

perjanjian internasional tertutup dimana perjanjian ini terkait antara dua Negara saja. Jika dilihat dari kaidah hukum, Deklarasi Jakarta 2012 termasuk dalam Perjanjian internasional yang mengeluarkan kaidah hukum yang khusus berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Dikarenakan yang melakukan hanya Negara Republik Indonesia dan Jerman saja, maka hukum yang ada terkait pada kedua Negara itu juga.

E. Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman di Bidang Pendidikan

Jerman merupakan salah satu dari tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia sejak generasi pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, diperkirakan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melakukan studinya di Jerman. Berdasarkan data laporan diri (LaDi) KBRI Berlin bulan Oktober 2017, terdapat 6.371 orang mahasiswa Indonesia di Jerman dalam berbagai jenjang mulai dari sekolah bahasa hingga program doktoral (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Kerjasama pendidikan Indonesia dengan Jerman secara formal didasarkan pada perjanjian tahun 1979. Perjanjian ini mencakup sektor pendidikan, riset dan ilmu pengetahuan serta pengembangan teknologi. Salah satu tindak lanjut perjanjian tersebut ialah kerjasama Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1988 tentang Initiative Biotechnology Indonesia-Germany (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Jerman memiliki nama yang begitu cemerlang sebagai destinasi melanjutkan studi dan melakukan penelitian. Jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya di Jerman telah meningkat melebihi 4100 orang, menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 67,4 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Kemudian selama bertahun-tahun Jerman telah menjadi salah satu pilihan pertama pelajar Indonesia untuk studi di luar negeri. Alumni dengan jumlah lebih dari 30.0000, termasuk salah satu presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, membangun jembatan penting dalam hubungan bilateral. Kemitraan universitas, program studi gelar ganda, dan beasiswa dari Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD) turut mempererat kerjasama dan menciptakan hubungan lestari antara kedua negara yang terlibat (Kementerian Luar Negeri Jerman, 2021).

Goethe-Institut berada di Jakarta, dan juga memiliki cabang di Bandung dan Jakarta, mempromosikan pertukaran budaya dengan cakupan luas antara kedua Negara melalui program bahasa dan kebudayaannya. Di bawah tajuk “Jerman-Indonesia”, Jerman Fest 2015 merayakan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Lebih dari 100.000 pengunjung di Indonesia menghadiri acara Jerman-Indonesia yang memiliki tema beragam, dari kebudayaan, politik, ekonomi, hingga sains (Kementerian Luar Negeri Jerman, 2021).

Bahasa jerman pun menjadi semakin terkenal di Indonesia. Pada saat ini, sekitar 200.000 orang Indonesia mempelajari bahasa Jerman, dan lebih dari 14.000 di antaranya masuk dalam 28 sekolah mitra di seluruh Indonesia. Kemitraan tersebut dikembangkan dari prakarsa PASCH (Sekolah: Mitra Masa

Depan) yang dibangun Februari 2008 oleh Menteri Luar Negeri Jerman saat itu dan Presiden Jerman. Prakarsa PASCH dirancang dengan kemajuan pendidikan dan pelatihan guru dan murid dengan pandangan untuk meningkatkan peluang pendidikan dan memberikan pengalaman baik Jerman dalam sekolah-sekolah di Negara lain (Kementerian Luar Negeri Jerman, 2021).

Pada 2016 Deutsche Schule Jakarta merayakan peringatan 60 tahun berdirinya. DSJ menawarkan ujian kelulusan berstandar internasional Jerman (Abitur) sebagai sertifikasi kelulusan sekolah, yang membuka kesempatan sangat lebar bagi lulusannya, termasuk untuk melakukan studi di Jerman. Jerman merupakan tempat studi dan sains yang baik dan telah menjadi salah satu lokasi studi paling populer bagi bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. Bahasa Jerman juga semakin populer di Indonesia. Lebih dari 150.000 orang Indonesia saat ini melakukan studi di Jerman (Kementerian Luar Negeri Jerman, 2021).

BAB III

GAMBARAN UMUM

KEBERHASILAN DEKLARASI INDONESIA-JERMAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

A. Kebijakan Indonesia- Jerman Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan saat ini menjadi keniscayaan oleh peningkatan kualitas hidup baik secara individual maupun kolektif. Keyakinan atau urgensi pendidikan telah menjadikan peradaban manusia kepada pembentukan sistem pendidikan, yang dipandang sebagai hal yang wajib. Dalam penyusuan terhadap keunikan setiap kelompok yang umumnya bersangkutan dengan nilai, ritual, teladan dan simbol, setiap bangsa mengembangkan sistem pendidikan yang dipandang tinggi dan mampu menjadi fasilitas yang ideal bagi pencapaian tujuan pendidikan. Saat ini biasa kita jumpai berbagai sistem pendidikan di dunia, yang seringkali dibangun berdasar metode pendidikan yang persis sama, akan tetapi tetap kaya dengan perbedaan di berbagai tingkatan kebijakan dan teknis pelaksanaan (Hofstede, 2001).

a. Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Jerman dan Indonesia

1. Sistem Pendidikan di Jerman

Pada awal pendidikan Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar yaitu, negara dan agama dalam hal ini gereja. Selain itu, negara bagian juga ikut menuntut wewenang untuk mengatur pola pendidikan secara mandiri. Sejak dikumandangkannya wajib belajar pada abad ke-17, masalah

pendidikan lambat laun mulai bergeser menjadi kewajiban negara (Nur Syah, 2001).

Undang-undang dasar mendukung hak setiap orang untuk secara bebas mengembangkan keperibadiannya dan memilih sekolah, pendidikan vokasi dan pekerjaan sesuai dengan keinginan dan kualitas. Berdasarkan tata negara federal Jerman, kewenangan pendidikan dibagi menjadi Federasi dan negara bagian. Negara bagian terutama kewajiban untuk sekolah kejuruan serta taman kanak-kanak (Nur Syah, 2001).

Saat ini, wajib belajar berlangsung mulai usia 6 tahun sampai 18 tahun, jadi selama 12-13 tahun. Untuk memenuhi wajib belajar harus dikunjungi sebuah sekolah penuh-waktu selama 9 tahun (dinegara bagian tertentu 10 tahun) dan setelah itu memasuki sekolah kejuruan paruh waktu dan sekolah penuh-waktu yang lain. Dengan demikian, pola pendidikan Jerman kurang lebih negara bagian membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan Indonesia.

2. Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Tinggi

Taman kanak-kanak diawali dari umur 3-6 tahun. Pendidikan ini disebut *Vorshulische Einrichtungen*, yang merupakan persiapan sebelum Pendidikan. Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak diikuti oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya *kindergarten*.

Untuk memasuki *Hauptschule*, *Realschule* atau *Gymnasium*, seseorang harus melalui tujuan orientasi. Di tahap ini di awasi bakat dan kemampuan dari

anak, dan tahapan ini memastikan kemana tujuan seseorang anak berikutnya. *Hauptschule* dan *Realschule* lebih ditekankan kepada anak yang ingin langsung kerja bila telah menyelesaikan sekolah. Tidak diragukan lagi setelah melewati pendidikan di *Berufsfachshule* atau *Fachoberschule*. Bagi yang ingin melanjutkan ke Universitas, jalan tercepat adalah melalui *Gymnasium*. Jalan pendidikan lain juga dapat mengikuti kuliah di Universitas, tapi dengan melalui jalan yang panjang (Hofstede, 2001).

Sebelum melanjutkan kuliah, para pria di Jerman diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Bila seorang dengan alasan kesehatan tidak dapat mengikuti wajib militer jadi sebagai gantinya mereka harus menjalani "Zivilliansdienst" atau lebih dikenal istilah Zivis. Zivis ini bekerja di rumah sakit, badan sosial atau badan pendidikan atau pemerintah.

Titel yang diperoleh dari Universitas di Jerman dan Indonesia hampir sama, akan tetapi walaupun namanya sama berbeda kelas. Diploma lulusan Jerman setara dengan S2 atau Master di Indonesia dan dapat langsung mengikuti program Doktoran (PhD). Hal ini tergantung dari *Annerkennung der Studienleistungen* (penyamaan derajat ijazah). Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu:

- a) Ijazah dari Indonesia dianggap setara dengan Vordiplom (semester 5).

Untuk mendapatkan Diplom, ia harus mengikuti semua mata kuliah dari semester 5 sampai dengan pembuatan Diplomarbeit (Penulisan Akhir untuk Mendapatkan Gelar Diploma)

b) Ijazah dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5, untuk mendapatkan Diploma.

c) Ijazah dari Indonesia dianggap sudah berhasil untuk dapat langsung mengikuti tingkat doktoran. Berdasarkan hal tersebut, maka lulusan S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai kemungkinan untuk langsung promosi (S3) tidak menyimpang jauh, akan mendapat keringanan pada saat *Anerkennung*.

Secara “gengsi” memang masih ada tanggapan dari masyarakat Jerman bahwa Universitas lebih bergengsi daripada *Fachhochschule*. Hal ini disebabkan rata-rata Professor atau Doktor kelas pertama di Jerman banyak yang berada di Universitas, tetapi anggapan ini mulai melenveng dengan makin majunya sistem di *Fachhochschule* sekarang (termasuk staff-nya makin berkualitas). Selain itu makin digemarinya *Fachhochschule* oleh masyarakat dikarenakan juga materinya yang lebih siap di terapkan untuk bekerja, serta adanya kerjasama antara universitas dan *Fachhochschule* di Bielefeld dengan Universitas Bielefeld relative memiliki staff pengajar, yakni professor yang sama, akses ke fasilitas (laboratorium dan perpustakaan) juga sama. Hal ini seperti inilah yang jarang terjadi di Indonesia. Atau bahkan dapat dikatakan sulit terwujudkan didunia pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataan potensinya sama dengan pendidikan di Jerman, mempunyai suatu yang khas, hanya yang berbeda metode pendidikan yang ditawarkan. Bagi yang suka kebebasan silahkan masuk ke universitas, namun bagi yang suka tuntunan

dipersilahkan masuk ke *Fachhochschule*, sehingga dapat segera bekerja dan mendapatkan gaji seperti yang diidam-idamkan (Hofstede, 2001).

3. Manajemen Pendidikan

Konstitusi federal Jerman telah meniggalkan kewenangan pengaturan metode pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini ialah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan. Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat negara bagian. Saat ini, negara bagian di Jerman mempunyai sistem pendidikan yang berbeda, di antaranya perbedaan masa pendidikan. Kondisi ini kemudian meminta pihak negara bagian untuk melakukan satu standarisasi yang berperan secara nasional, sehingga pada tahun 1969, sebagian wewenang negara bagian dalam masalah pendidikan dialihkan ke pemerintahan federal. (Nur Syah, 2001)

Pendanaan pendidikan dibebankan kepada keuangan belanja negara bagian dan partisipasi masyarakat lokal. Pembagiannya mencakup pendanaan biaya personil yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini, pemerintahan federal utamanya bertanggungjawab atas pendanaan perluasan institusi pendidikan tinggi, fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pendidikan dan kegiatan penelitian.

b. Sistem Pendidikan di Indonesia

Bagian ini akan mencoba membahas permasalahan pendidikan yang dikritisi oleh beberapa pihak yang menaruh perhatian pada pola pendidikan nasional. Kajian tidak mengarah pada perbuatan justifikatif terhadap metode pendidikan sendiri, namun lebih mengarah ke salah satu tujuan *Comperative Education* yang bertujuan melahirkan saran bagi perbaikan sistem pendidikan di negeri tercinta.

Secara umum sistem pendidikan Jerman dan sistem pendidikan Indonesia tidak memiliki perbedaan secara signifikan. Sistem pendidikan didirikan di atas prinsip pendidikan dan keilmuan yang hampir sama, namun dengan ideologi dan kekhasan budaya yang berbeda. Berikut adalah beberapa catatan sederhana mengenai kajian banding sistem pendidikan diantara dua negara sebagai berikut

1. Pendanaan

Komparasi pertama antara sistem pendidikan di Jerman dan di Indonesia, juga seringkali di jadikan bukti utama perbaikan pendidikan oalah masalah pendanaan. Mungkin memang merupakan hal yang wajar tetapi baru saat ini ada titik terang dengan pembebasan dana pendidikan dalam jenjang tertentu. Mewajibkan sesuatu barang, tentu harus kepada orang yang mampu melaksanakannya. Wajib belajar 9 tahun di Indonesia saat ini masih tidak memenuhi rumus tersebut. Walaupun biaya SPP bebas, masyarakat masih permasalahan besarnya biaya lain yang harus ditabggung dalam menempuh pendidikan dasar. Di Jerman, pembebasan baiaya pendidikan dilakukan melalui kebijakan subsidi silang. Kebijakan ini

terbukti ampuh meningkatkan partisipasi penduduk Jerman yang berimbas pada angka *human development index* yang membanggakan (Nur Syah, 2001).

Bila masalah biaya dianggap sepele, maka biasa kita lihat bahwa negara-negara dengan peringkat pendidikan papan atas, seperti Finlandia sebenarnya memiliki alokasi dana pendidikan yang relatif tinggi. Merendahkan masalah ini dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan terhadap fenomena guru yang merangkap menjadi tukang ojek di Indonesia. Permasalahan pendanaan pendidikan di Indonesia juga akan berdampak langsung terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan (Nur Syah, 2001).

2. Manajemen Pendidikan

Wewenang untuk mengambil kebijakan prinsipil dalam sektor pendidikan di Indonesia masih diurus oleh pemerintahan pusat. Artinya, pemerintahan daerah masih takut mengambil otoritas untuk menentukan masa pendidikan atau corak seragam di sekolah formal. Ini biasa menjadi sebuah hal yang positif di Indonesia, mengingat dengan demikian standarisasi pendidikan di manapun di Indonesia masih setara. Di Jakarta atau Manokwari, semestinya kriteria pendidikan untuk tingkat sekolah dasar sama, sehingga kemampuan siswapun sama. Jerman perbedaan masa pendidikan dasar (ada yang 9 tahun ada juga yang 10 tahun) menimbulkan perbedaan masa pendidikan.

Kebijakan penempatan guru di Indonesia masih menyimpan PR dalam bidang relevansi dan kualitas. Kadang guru yang mengajar tidak mempunyai kualitas yang

relavan dengan mata pelajaran yang diajarkan, kadang relavan namun kualitasnya belum memadai untuk menjadi tenaga pendidik.

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan masih minim. Hal tersebut didorong oleh tanggapan bahwa pendidikan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah dan bukan masyarakat. Hal tersebut menjadi susah mengingat beemacam keterbatasan yang dimiliki pemerintah, menghambat terwujudnya sistem pendidikan yang baik dalam ranah konsep dan teknis. Di Jerman, sumbanagan masyarakat sudah mengakar dalam dunia pendidikan. Partisipasi aktif muncul dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat serius, sehingga tidak mau mengambil resiko meregangkan kualitas pendidikan.

3. Tujuan Pendidikan Indonesia dan Jerman

Dalam pendidikan di Indonesia, siswa dididik mulai dari moral, etika dan agama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal tersebut mendapatkan pengajaran yang cukup besar. Siswa diajarkan bagaimana cara santun terhadap guru dan lain sebagainya, agama pun demikian, selain itu siswa juga mendapatkan bimbingan dari orang tua maupun guru.

Berbeda dengan pembelajaran di Jerman. Di sana lebih mengutamakan kepada kemandirian. Pendidikan di sana menuntut kepada tiap individu untuk mampu berpikir kreatif, logis dan mampu bertanggung jawab. Itu sebabnya mengapa anak di Jerman diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya dan tidak serta merta dibimbing oleh orang tua dan guru. Anak-anak di Jerman bisa dikatakan tidak terlalu mengutamakan pendidikan agama, mereka punya cara masing-masing untuk hidup dan bersosialisasi (Wahyudi. R, 2019).

c. Kebijakan Pendidikan di Jerman

- a) Pemerintah Jerman menghormati pendidikan sebagai modal awal untuk bangkit dari masalah ekonomi dan keterpurukan ideologi. Untuk itu, pemerintah berusaha meyakinkan ketercapaian akses pendidikan bagi seluruh warga negara dengan tidak membayar biaya pendidikan dari *Kindergarten* sampai tingkat pendidikan tinggi (Hofstede, 2001)
- b) Pemerintah federal pusat tidak “memonopoli” kewenangan pengaturan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kewenangan pengaturan sistem pendidikan juga dimiliki oleh negara bagian. Pembagian kekuasaan ini mengarah kepada upaya untuk tidak menumpukkan kekuasaan di satu pundak, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi pelanggaran atau pengambilan keputusan pendidikan yang lemah, tidak akan berimbas secara global.
- c) Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berhasil cukup besar. Dibandingkan dengan Indonesia, partisipasi masyarakat Jerman jauh lebih terlihat.
- d) Setelah *Wiedervereinigung* atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Masyarakat Jerman bisa melihat kesenjangan antara dua wilayah ini dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Untuk itu pemerintah mengupayakan menyeimbangkan kondisi kedua belah pihak dengan memberikan alokasi dana belanja negara yang lebih proposional bagi pembangunan pendidikan di bekas Jerman Timur.

e) Pemerintah Jerman sangat mengawasi kualifikasi tenaga pendidik. Menjadi tenaga pendidik di Jerman mungkin sama sulitnya untuk menjadi dokter. Relevansi keahlian tenaga pendidik dengan mata pelajaran yang diajarkan, kualitas pengajar dan kesejahteraan yang diperoleh tenaga pendidik merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di Jerman (Hofstede, 2001)

Dalam dokumen *Indonesia-German Development Cooperation* yang diterbitkan oleh kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia pada tahun 2002 disebutkan bahwa terdapat beberapa motivasi yang dimiliki Jerman untuk memberikan bantuan pembangunan sebagai berikut:

1. Adanya dorongan moral yang dimiliki Jerman untuk membantu negara lain.
2. Kepentingan Jerman secara umum, contohnya dalam prospek jangka panjang untuk perdamaian dan keseimbangan keamanan untuk kesejahteraan segala bangsa.
3. Terkait dengan perekonomian Jerman yang sangat berorientasi pada ekspor
4. Jerman mempunyai motivasi untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan global.

Selain itu, pada Juni 2002 BMBF telah menerbitkan Asia Concept 2002. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman (EKONID) memperdalam kerjasama dalam peningkatan pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia. Pendidikan dan pelatihan vokasi

tersebut sesuai dengan standar Jerman (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2018),

a. Adapun beberapa poin kerjasama Kemenko Perekonomian dan EKONID

tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan keterlibatan perusahaan dan dunia industry dalam memperluas pendidikan dan pelatihan Vokasi melalui berbagai inisiatif bersama oleh Kemenko Perekonomian dan EKONID.
2. Pendidikan vokasi sistem ganda sinkron dengan standar Jerman untuk jurusan industri mekanik selama 2,5 tahun , yang merupakan pertama kali dilakukan bersama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di Indonesia.
3. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik sekolah SMK dan pelatih tempat kerja di perusahaan melewati training of trainers berdasarkan standar Jerman.
4. Dukungan program pelatihan vokasi (pemagangan) bagi sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2018)

Melalui pengesahan Declaration of Inten ini, kedua Institusi membangun skema yang berkelanjutan untuk meningkatkan porsi pelatihan praktik bagi siswa SMK di perusahaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di SMK. Selain itu, muncul pula Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Michael Freiherr von Ungern-Sternberg. Kepala Sekolah SMKN 26 Jakarta,

Purwosusilo perwakilan Kementerian/lembaga serta dunia usaha dan industri dari Indonesia dan Jerman.

b. EKONID, dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi didukung oleh Skills Expert Program dari Kementerian Federal Untuk Perekonomian dan Energi (BMWi) dan Kemenko Perekonomian, menetapkan 3 (tiga) bidang kerjasama, meliputi:

1. Pendidikan vokasi sistem ganda menurut standar Jerman untuk berbagai profesi melalui kerjasama dengan SMK (Proyek pilot: jurusan industry mekanik SMKN 26 Jakarta).
2. Training of trainers, pelatih tempat kerja menurut standar Jerman dan mendorong dunia usaha dan industri Jerman maupun Indonesia Untuk berperan dalam program pemagangan dari SMK di Indonesia.
3. Meningkatkan skema yang lebih baik dalam peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi, Jerman dan Indonesia bagi dunia usaha dan industri di Indonesia (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2018).

Pada Juli 2012 di Jakarta, Kanselir Merkel setuju dengan Presiden Indonesia saat itu Yudhoyono dalam Deklarasi Jakarta sebuah perjanjian tematis yang luas pada prinsipnya sebagai dasar untuk kerjasama Jerman-Indonesia yang beragam dan ketat dalam konteks kemitraan strategis. Sebagai Negara anggota Uni Eropa dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terbesar, Jerman dan Indonesia memiliki banyak relasi dalam hal kebijakan regional. Pada 2019/2020 Indonesia dan Jerman akan bekerjasama sebagai konstituen yang tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Jerman-Indonesia Hubungan Bilateral, 2016).

Umumnya semua prosedur dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya kepekaan yang tinggi di antara para penggiat pendidikan, melalui tanggung jawab yang dimiliki semua elemen masyarakat dan pengawas yang mapan.

B. Keberhasilan “Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: *Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” dalam Bidang Pendidikan

Pemerintah Indonesia dalam kerjasama ini mengutamakan pada kerjasama pendidikan dan pelatihan pendidikan vokasi. Hal ini dikarenakan menganggap kebutuhan pasar. Di Jerman sejak awal pendidikan memang sudah ditujukan apakah siswa akan terus ke universitas atau kemudian mengambil jalur vokasi. Sementara itu di Indonesia, bagi mereka yang sudah merampungkan pendidikan selama 9 tahun ingin langsung bekerja, diberi waktu untuk bekerja magang. Menerima gaji dan dua hari dalam satu minggu dapat bersekolah keterampilan (sekolah vokasi). Dalam beberapa tahun terakhir terlihat pendidikan vokasi yang dimulai dari sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai politeknik mulai berada dipuncak. Mereka banyak dicari. Penyebab lulusan sekolah kejuruan ini dinilai punya keterampilan yang baik dan siap terjun didunia kerja. Seperti di dalam MoU antara ikatan ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) Jerman dan persatuan alumni Jerman (PAJ) tahun 2012, program sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Vocational Training juga menjadi perhatian. Seperti kerjasama antara *Berufschule* (semacam SMK Jerman) dan SMK di Indonesia untuk pengembangan kurikulum dan pertukaran guru.

Kerjasama ini tentunya membawa dampak positif tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga Jerman dimana kedua negara dapat meningkatkan kesadaran tentang aspek sosial kemasyarakatan, kebudayaan dan tentunya memperdalam kerjasama diplomatik kedua negara. Tetapi dampak yang sebenarnya terjadi ialah, kapitalisasi *Nation Branding* yang dilakukan oleh Jerman di Indonesia. Negara Jerman sangat baik terhadap Indonesia dalam memberikan bantuan dana maupun pengiriman tenaga ahli. *Nation Branding* bertujuan untuk mengukur, membangun, dan mengelola reputasi negara (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018).

Kerjasama Internasional Indonesia-Jerman memiliki dampak positif bagi kedua negara, terkhusus pada bidang pendidikan di Indonesia yang dampaknya meningkat secara signifikan. Dengan terikatnya kerjasama Internasional melalui Deklarasi Jakarta 2012, Jerman berhasil memperluas penggunaan Bahasa Jerman di banyak sekolah dan universitas di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menerima banyak subsidi dan tenaga ahli dari Jerman untuk pembangunan Negara dan SDM yang lebih baik. Dengan kerjasama Internasional ini, Jerman juga menyediakan kelonggaran bagi pelajar Indonesia berupa beasiswa untuk meneruskan pendidikan ke Jerman. Keberhasilan kerjasama ini membuat Jerman menjadi satu dari tujuan pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, ditafsirkan sebanyak 27.000 pelajar Indonesia telah melanjutkan studi di Jerman (Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018).

Pada bidang pendidikan tinggi dalam rangka promosi kerjasama di bidang pendidikan yang pernah ditandatangani pada 28 September 1988, sampai tahun

2014 telah ada kerjasama antara Universitas Indonesia dan Jerman. Menurut informasi yang penulis peroleh dari Kemendikbud RI (Biro Kerjasama Luar Negeri), terdapat 27 Universitas di Indonesia yang telah bekerjasama dengan berbagai universitas di Jerman. Setiap universitas di Indonesia memiliki ikatan tidak dengan satu universitas saja. Institute Teknologi Bandung (ITB) adalah universitas yang bekerjasama dengan 15 universitas di Jerman. Banyak universitas bekerjasama pada bidang teknik, karena Jerman ialah salah satu Negara berteknologi tinggi. Teknologi tersebut diantaranya teknologi pada sektor kesehatan, transportasi, lingkungan, energi terbarukan, serta pengetahuan alam.

Adapun kesepakatan lain yang dilakukan antara Indonesia-Jerman. Kesepakatan tersebut yakni Joint Declaration Of Inten (JDI) Jerman-Timor Leste-Indonesia, yakni pemberian beasiswa dari Pemerintah Jerman kepada mahasiswa Timor Leste untuk belajar di Indonesia yang ditandatangani pada 3 Mei 2007. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan di Timor Leste yang kurang memadai, sehingga Jerman memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswanya untuk belajar di Indonesia. Selain karena mudah di jangkau, hal tersebut juga menekan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Timor Leste daripada mahasiswanya harus pergi ke Jerman (Yarnis, 2015).

Dalam perkembangannya hubungan Indonesia dengan Jerman semakin membaik, terutama saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Berlin pada April 2016, saat itu Presiden Joko Widodo dengan Kanselir Angela menyepakati kerjasama dengan fokus pada bidang pendidikan vokasi. Dalam kerjasama dibidang pendidikan ini yang terlibat bukan hanya actor negara saja tetapi actor

non-negara juga bergabung seperti *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* atau lebih dikenal dengan GIZ, yaitu perusahaan internasional Jerman. Kerjasama tersebut termasuk kedalam *soft diplomacy* dalam regionalism, dikarenakan adanya kerjasama antar actor negara dengan actor non-negara (Lestari. SA, 2021).

Kerjasama dalam bidang pendidikan antara Indonesia-Jerman memang sudah banyak dilakukan dikarenakan adanya pertukaran mahasiswa atau *student exchange*, summit camp dan lainnya antar kedua negara tersebut. Jumlah mahasiswa yang berkuliah di Jerman sendiri setiap tahunnya memang mengalami peningkatan, data dari lapor diri KBRI Berlin pada bulan Oktober tahun 2017 terdapat 6.371 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikannya di Jerman. Kerjasama kali ini memiliki perbedaan yaitu, bukan hanya pertukaran pelajar, tetapi kerjasama kali ini justru Jerman ingin menerapkan caranya dalam pendidikan vokasi di Indonesia.

Dalam kerjasama bidang pendidikan vokasi ini, tidak selamanya berjalan dengan mudah dan pastinya terdapat beberapa tantangan dikarenakan kedua negara yang berbeda. Salah satu tantangannya adalah di Indonesia sendiri masih ada kesenjangan antara kemampuan orang yang memiliki lulusan pendidikan dengan kejuruan, hal tersebut yang menghambat perkembangan dikarenakan sulitnya mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Sedangkan di Jerman sendiri, pendidikan vokasi adalah kewajiban dan hal tersebutlah poin keberhasilannya dikarenakan adanya kerjasama dengan private

sector. Di Indonesia sendiri masih minimal yang melakukan hal tersebut (Lestari. SA, 2021).

Stigma di Indonesia melihat bahwa sekolah kejuruan tidak lebih baik dengan sekolah jurusan tertentu, hal tersebut juga yang masih menghambat Indonesia, juga masih adanya stereotipe gender. Sehingga GIZ menyelenggarakan webinar dengan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Jerman dan juga Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perusahaan Intel Indonesia, dalam webinar tersebut para perempuan dilatih belajar pola pikir yang berfokus pada solusi, inovasi agar dapat memecahkan suatu masalah (Lestari. SA, 2021).

C. Strategi Pengembangan Pendidikan Vokasi Indonesia-Jerman

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ adalah perusahaan internasional Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih 120 negara dalam bidang kerjasama pembangunan. Dalam implementasinya GIZ bekerjasama tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga bersama lembaga negara maupun sektor swasta. Salah satu fokus utamanya di Indonesia saat ini adalah meningkatkan kualitas di bidang pendidikan vokasi/kejuruan (Sri Sayekti, 2018)

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan mereka tahun 2016 telah menandatangani kesepakatan tentang kerjasama bilateral di bidang pendidikan vokasi di Indonesia.

Di Jerman, yang dianggap sebuah success story dalam dunia pendidikan vokasi, rahasia keberhasilannya adalah kerjasama yang sangat erat dengan private

sektor. Inilah jadi tantangan besar bagi Indonesia dan ini yang ingin dipelajari oleh Indonesia (Sri Sayekti, 2018)

a. Adaptasi Sistem Pendidikan Vokasi Jerman di Indonesia

Keunggulan sistem ganda pendidikan dan pelatihan vokasi Jerman sejak lama diakui banyak negara. Indonesia kini perkuat pendidikan vokasi dengan tingkatan kerjasama dengan Jerman. Berdasarkan perkiraan *United Nation World Population* (UNWP), jumlah penduduk usia produktif Indonesia (15-64 tahun) akan mencapai 200 juta pada tahun 2030. Hasil riset *McKinsley Global Institute* yang diolah dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia memiliki kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta orang, sementara tenaga terampil Indonesia saat ini baru berjumlah sekitar 57 juta orang (dw.com, 2017).

Keunggulan sistem ganda pendidikan dan pelatihan vokasi Jerman telah sejak lama diakui banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, berbagai kerjasama antara Indonesia dan Jerman di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi telah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya melalui Indonesia German Institute (IGI) pada tahun 2002 dan juga melalui program Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET) pada tahun 2010. Sebagaimana diketahui, salah satu kekuatan perekonomian Jerman selama ini terletak pada industri/usaha ukuran kecil dan menengah yang kuat dengan ditopang ketersediaan tenaga kerja terampil dalam jumlah dan

kualitas yang cukup, merata dan terstandarisasi di seluruh Jerman (dw.com, 2017).

Hal ini dapat dicapai secara berkesinambungan karena didukung sistem ganda vokasi yang diimplementasikan secara nasional dan merupakan cerita sukses Jerman sekaligus landasan perekonomian Jerman yang solid. Sementara itu, walaupun pihak di Indonesia telah menerima manfaat dari berbagai kerjasama TVET dengan pihak Jerman, harus diakui bahwa sistem ganda pendidikan/pelatihan vokasi seperti yang diberlakukan di Jerman belum menjadi sesuatu yang baku, apalagi berlaku nasional di Indonesia. Berbagai kerjasama masih merupakan upaya individu, sektoral dan regional tertentu yang berjalan sporadik.

b. Kemitraan Indonesia-Jerman di bidang vokasi

Presiden Joko Widodo ingin membawa kemitraan Indonesia-Jerman di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo bersama Kanselir Jerman Angela Merkel sepakat untuk memperkuat *Jakarta Declaration* tahun 2012 – dokumen resmi kemitraan komprehensif Federal Jerman dengan mengangkat khusus isu TVET (bersama dengan isu kemaritiman dan energy terbarukan) sebagai bidang utama peningkatan kerjasama dan kemitraan antara Indonesia dengan Jerman (dw.com, 2017).

Adapun pertimbangan Presiden RI adalah kesadaran bahwa Indonesia memiliki tantangan dalam mersepon bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2028-2030. Data BPS/Bappenas/UNFPA

mengatakan 68,1% penduduk Indonesia adalah usia produktif (15-64 tahun) atau berdasarkan data UNWP: 69,4% dari total penduduk Indonesia adalah usia produktif (dw.com, 2017).

c. Kemendikbudristek dalam Melakukan Revitalisasi dan Transformasi Pendidikan Vokasi

Saat ini kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sedang dan akan terus merevitalisasi dan mentransformasikan pendidikan vokasi agar lebih link and match dengan dunia usaha dan dunia industry. Lemendikbudristek juga terus berupaya memberikan dukungan kebijakan bagi dunia usaha dan dunia industry untuk besinergi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, ini sebagai bagian dari implementasi kebijakan merdeka belajar khususnya di bidang pengembangan pendidikan vokasi (Media Indonesia, 2021).

Kemendikbudristek juga selalu menindaklanjuti arahan dari Presiden RI untuk meningkatkan pembelajaran dari pelaku maupun praktisi industry yang saat ini akan terus di sempurnakan dukungan kebijakannya dalam rangka memfasilitasi industri bisa masuk sebesar-besarnya ke dalam satuan pendidikan vokasi dan mendukung penyelenggaraan pembelajaran di pendidikan vokasi. Termasuk secara intens Ditjen Pendidikan Vokasi berupaya untuk mengawal implementasi Instruksi Presiden tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dengan terus menjaga pola

koordinasi antar Kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi SMK menuju 5000 SMK terevitalisasi

Beberapa hal telah menjadi fokus Ditjen Pendidikan Vokasi adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran pendidikan vokasi, kemudian pemerataan akses dan fasilitas serta kualitas SDM baik dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, termasuk peserta didik. Berikutnya yaitu menjamin mutu pendidikan vokasi agar memiliki kesesuaian dengan perkembangan kekinian serta permintaan dari dunia kerja. Hal ini semata-mata untuk menciptakan lulusan vokasi agar memiliki kesesuaian dengan perkembangan kekinian serta permintaan dari dunia kerja. Hal ini semata-mata untuk menciptakan lulusan vokasi yang berkompoten yang memiliki softskill kuat, hardskill yang mumpuni, berkarakter pancasila, memiliki integritas, berdaya saing secara global, serta berjiwa socio-teknopreneurship (Media Indonesia, 2021).

Dalam aspek penguatan perguruan tinggi vokasi Ditjen Pendidikan Vokasi juga memberikan ruang untuk dunia kerja masuk ke dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi baik itu politeknik maupun program studi vokasi yang ada di universitas, sekolah tinggi, maupun Institut. Beberapa program utama sebagai inovasi penguatan pendidikan tinggi vokasi telah terangkum dalam Kebijakan Merdeka belajar episode ke-11. Episode ini menghadirkan skema pendanaan matching fund dan competitive fund bagi pendidikan tinggi vokasi untuk merangsang dunia

usaha dunia industry masuk berkolaborasi dalam pola kerja sama yang dapat dipilih (Media Indonesia, 2021).



BAB IV

BAGAIMANA STRATEGI KERJASAMA INDONESIA – JERMAN TERHADAP KEBERHASILAN “*Indonesia-Germany Joint Declaration for a Comprehensive: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility*” PADA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012-2016

Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini mengenai bagaimana strategi kerjasama Indonesia-Jerman terhadap keberhasilan Deklarasi Jakarta pada bidang pendidikan tahun 2012 – 2016, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional yang merujuk pada konsep dari Kalevi Holtsi yang mengemukakan bahwa kerjasama internasional antar negara dapat terwujud karena hal-hal berikut:

A. Pandangan Dua atau Lebih Kepentingan

Dalam hal ini, nilai-nilai tujuan antar kedua negara yakni Indonesia-Jerman yang saling bertemu dapat menimbulkan hasil yang dapat dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

1. Bahasa, Seni dan Budaya

Untuk bidang bahasa, Jerman membuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk belajar Bahasa Jerman. Pusat Kebudayaan Jerman yang ada di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai fasilitator pengajaran Bahasa Jerman adalah *Goethe Institute* yang berada di dua kota besar yakni Jakarta dan Bandung. Untuk sastra, seni dan musik, sangat sedikit ketertarikan dari masyarakat Indonesia untuk mempelajarinya. Terbukti

dengan meningkatnya ketertarikan orang Jerman terhadap kesenian Indonesia, telah dibuka program studi bahasa, seni dan budaya Indonesia di 7 Perguruan di Jerman (Konsulat Jenderal RI Frankfurt).

2. Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

Merupakan perusahaan internasional Jerman yang bekerja di berbagai bidang di lebih dari 120 negara dalam bidang kerjasama pembangunan. Dalam pelaksanaannya, GIZ bekerjasama tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga bersama lembaga negara maupun sektor swasta. Salah satu fokus utamanya di Indonesia saat ini adalah memajukan kualitas di bidang pendidikan vokasi/kejuruan (GIZ, 2011).

Di Jerman, yang dianggap sukses story dalam dunia pendidikan vokasi, rahasia keberhasilannya adalah kerjasama yang sangat erat dengan private sektor. Di Indonesia sukses story-nya ada di sekolah Kejuruan ATMI Solo, atau Mikael Solo. Di sana para pelajar sekolah kejuruan dapat magang di salah satu perusahaan, dan sebelum lulus, mereka sudah mendapat tawaran pekerjaan (Kontan.co.id, 2018).

Selain program magang terdapat juga program workshop yang dimana perusahaan bisa membuka bengkel di sekolah kejuruan. Kerjasama dengan sektor swasta mesti di elaborasi lebih lanjut, misalnya penyusunan kurikulum, pelatihan guru dan instruktur, sehingga keberhasilan yang dicapai dapat direplikasikan ke sekolah seluruh Indonesia.

B. Pandangan atau Harapan dari Suatu Negara

Pandangan atau harapan dari suatu negara dalam hal ini bahwa kebijakan yang diputuskan berdasarkan kerjasama Internasional Jerman-Indonesia akan membantu masing-masing negara dalam mencapai kepentingannya.

1. Pendidikan Vokasi

Indonesia juga memiliki kepentingan nasional bersamaan dengan hubungan bilateral tersebut adalah transfer pendidikan vokasi (*vocational education*). Arah kerjasama tersebut berdasarkan konsep Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Berlin. Prof. Agus Rubiyanto mempunyai keinginan untuk menyokong banyak ruang untuk belajar tentang kreativitas dan inovasi melalui pendidikan kejuruan. Menurutnya, kemajuan Jerman didukung oleh berbagai ilmu praktis yang sangat spesialis. Apabila semakin dikembangkan, kemitraan strategis tersebut banyak memberikan dampak yang berarti bagi pembangunan negara Indonesia di masa depan. Pemerintahan Jerman memiliki kepentingan nasional di Negara Indonesia yaitu untuk memperluas bahasa Jerman di luar perbatasan negaranya (Utama, 2016).

Hubungan antara Indonesia dan Jerman di bidang pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan keahlian kerja para lulusan sekolah kejuruan dan calon tenaga kerja di beberapa lokasi di Indonesia. Kerjasama dengan Jerman di sektor ini dapat menjadi salah satu katalis untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dalam meningkatkan daya saing bisnis dan daya tarik Indonesia sebagai Negara

sasaran bisnis. Para lulusan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja secara khusus akan menjadi pekerja lintas Negara di berbagai sektor. Misalnya konstruksi, manufaktur dan pariwisata (Konsulat Jenderal RI Frankfurt)

Strategi sekolah kejuruan yaitu perbaikan kesempatan kerja bagi lulusannya serta pada implementasi ketenagakerjaan di beberapa daerah terpilih di Indonesia. Kondisi ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, 23 Sekolah Kejuruan terpilih dengan perusahaan-perusahaan Jerman dan Indonesia yang terpilih dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

2. Bidang Riset dan Pendidikan

Universitas-universitas Jerman menjadi tempat pendidikan utama bagi mahasiswa dan para ilmuwan dari Indonesia, mulai dari generasi pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, kurang lebih 20.000 mahasiswa menyelesaikan pendidikannya di Jerman. Dengan demikian, Jerman memprioritaskan, bukan saja proyek riset bersama tetapi juga pertukaran informasi serta pendidikan lanjutan untuk para mahasiswa dan ilmuwan.

a. Kerjasama di tingkat Universitas dan Instansi Riset

Dalam jumlah besar telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara instansi riset maupun juga antara perguruan tinggi dan instansi riset yang lain yang tepat. Perjanjian kerjasama ini tercatat di fungsi Diknas KBRI Berlin sejak tahun 1986 ialah sekitar 118,

berupa kerja sama antara universitas (“U to U”). Seperempatnya masih aktif, seperti misalnya Universitas Gottingen dengan Institusi Pertanian Bogor, Universitas Darmstadt dengan Institusi Teknologi Surabaya, Universitas Duisburg-Essen dengan Universitas Indonesia, Universitas Teknik Braunschweig dengan Universitas Gajah Mada.

b. Komisi dan petugas bilateral

Pada pangkat kementerian BMBF dan RISTEK, bidang-bidang sentral dari kerjasama bilateral ini disinkronisasikan melalui komisi “*Interministerial Committee*” yang didirikan pada tahun 2002. Fokus utamanya ialah kerjasama di bidang *Innovation Politics*. Selain itu, komisi ini bekerja untuk mengevaluasi kerjasama yang sedang berlanjut dan berfungsi sebagai penasehat tentang titik berat baru di kerjasama ilmiah dan teknologi (Agus Rubianto, 2009).

Disamping itu, dua komisi lain menyesuaikan kerjasama ilmiah dan teknologi pada dua bidang terpilih :

1. **Komisi Bioteknologi** telah didirikan pada tahun 1979. Pada tahun 1988 BMBF bersama dengan BPPT mendirikan proyek Bioteknologi “*Biotechnology Indonesia-Germany*” (*BTIG*). Berdasarkan strategi ini, pada tahun 1999 dibentuk program baru “*IG-Biotech*”. Prioritas utama yaitu proyek-proyek yang mengedepankan kerjasama antara baik instansi riset maupun perusahaan dari kedua belah pihak. Saat ini, titik

berat kerjasama adalah Bioteknologi Tanaman dan Pembibitan Tanaman, Pembersih Air Limbah dan Sampah Industri dengan Bioteknologi Pangan dan Fermentasi Makanan. Suatu bidang yang baru dimasukkan adalah “*Molecular Farming*” sebagai sumber untuk produksi obat suntik. Kerjasama ini berjalan sejak tahun 2000. *The 14th Indonesian-german Biotechnology Steering Committee Meeting* diadakan di Yogyakarta, 4-6 September 2006.

Melaksanakan the 15th Indonesia-German Biotechnology Steering Committee Meeting, di Jerman, November 2007. Pertemuan steering committee dalam sektor bioteknologi adalah event penting untuk memastikan keberlanjutan ataupun penerimaan proyek kerjasama baru (Agus Rubianto, 2009).

2. Komisi Ilmu Kelautan dan Geologi

Telah didirikan pada tahun 2000 dan melakukan pertemuan setiap satu sampai dua tahun di Jerman dan Indonesia. Titik berat pada saat ini ialah registrasi dan penggunaan sumber daya berjangka waktu panjang, pengawasan gunung api, manajemen sungai dan daerah pantai, bahan alam kelautan dan *aquaculture*. Komisi tersebut saat ini juga memperjuangkan rencana-rencana di bidang riset dan teknologi lingkungan. *The 6TH Earth and Ocean Research Sciences Steering Committee Meeting* yang mulanya direncanakan dan diadakan di Denpasar pada 13 November 2006 tetapi ditunda hingga tahun 2007. Pertemuan ini mereview rencana-rencana kerjasama di bidang kelautan dan kebumihan yang tergabung dalam SPICE (*Science for the*

Protection of Indonesian Coastal Ecosystem). SPICE project terdiri dari 5 cluste, yaitu:

1. Coral Reef Based Ecosystem and Resource
2. Strategies for a Sustainable Use of the Living Resources and Mariculture in Segara Anakan Lagoon
3. Coastal Ecosystem Health
4. Marine Natural Products
5. Marine Geology and Biogeochemistry
6. Governance and Management of Coastal Social-Ecological System.

C. Persetujuan atas Masalah Tertentu antara Dua Negara

Terjalannya persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau yakni antara Indonesia-Jerman dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

Beberapa program dari berbagai organisasi kerjasama pembangunan dianggap sangat penting karena ada sinergi dan beberapa persamaan dengan bidang riset dan pengembangan, antara lain khususnya *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)* dan *Centrum fur Internatinale Migration und Entwicklung (CIM)*.

1) BMBF

Sejak tahun 2000, BMBF bekerjasama dengan RISTEK dalam rangka modernisasi peta riset dan pengembangan di Indonesia. Tujuan utama

RISTEK adalah memperluas sistem inovasi nasional dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasaran global, khususnya dengan mempererat hubungan antara bidang riset dengan pelaksanaannya di bidang ekonomi pada perusahaan kecil dan menengah (PKM).

Selain itu, BMBF mengkomodasi Indonesia mendirikan “*Business & Technology Centers*” yang bertugas untuk mempererat hubungan antara PKM dengan instansi riset dan pengembangan maupun untuk memperkuat proses desentralisasi. BTC juga berfungsi sebagai penasehat untuk pengembangan dan pembiayaan modal usaha baru dan juga untuk pendidikan lanjutan. Diharapkan juga networking dengan perusahaan yang setara di negara-negara lain untuk memperbesar know-know transfer. Pada tahun 2003 telah didirikan BTC pertama di Jakarta, Yogyakarta, dan Batam (Agus Rubianto, 2009).

2) **Deutscher Akademischer Austauschdienst**

DAAD memiliki cabang di Jakarta dan kantor informasi di Surabaya. Selain program pertukaran umum, DAAD ditugaskan oleh BMBF untuk mengkoordinasikan program beasiswa untuk bidang riset kelautan sampai tahun 2007. Program ini diharapkan berkontribusi untuk mengamankan kualitas tinggi pada kerjasama dalam bidang tersebut.

Bersama dengan *Fraunhofer Society*, pada tahun 2003 DAAD telah meneruskan “*Technoptreneur Award for Life Sciences*” kepada dua ilmuwan Indonesia. Riset mereka yang luar biasa berpotensi tinggi untuk

dipasarkan. Dengan hadiah ini, kedua-duanya dapat meningkatkan proyeknya di Institut Fraunhofer di Jerman (Botschaft, 2012).

3) Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ)

Sejak lebih dari 30 tahun, GTZ yang ditugaskan oleh pemerintah Jerman, aktif di Indonesia. Pada tahun 1984 telah ditandatangani kesepakatan dasar untuk kerangka kerjasama teknik. Proyek kerjasama teknik berdasarkan atas masalah ekonomis, social, politis dan ekologis dan pada saat ini memfokuskan reformasi ekonomi, kesehatan dan desentralisasi (GTZ, 2008).

4) Indonesian-German Institute

Merupakan gabungan institusi pelatihan terpilih sebagai IGI-Alliance yang menetapkan pendekatan Teaching Factory. kerjasama ini menggabungkan pendidikan pelatihan kerja dengan teknologi inovatif dan metode produksi yang telah teruji. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta pembaruan kesempatan kerja dan semangat berwiraswasta merupakan tujuan aliansi ini (Agus Rubianto, 2009).

IGI-Alliance merupakan media marketing bersama bagi 5 IGI-Center dan 14 IGI-Partner di pulau Jawa. Lingkup jasa IGI diperuntukkan bagi penggemar perseorangan maupun para professional, khususnya mereka yang akan sedang bekerja di sektor industri serta usaha kecil dan menengah (Agus Rubianto, 2009).

D. Aturan Resmi atau Tidak Resmi

Adanya aturan resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan bersama antar kedua negara, dalam hal ini Indonesia dan Jerman.

1. Kerjasama Teknologi Indonesia Cultural Day dengan Kampus Jerman

Data kemendikbud menunjukkan bahwa KBRI Berlin bekerjasama dengan HTWG Konstanz untuk berpartisipasi dalam pendidikan dengan tiga perguruan tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dalam rencana pertukaran mahasiswa dan dosen, serta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam program *joint degree* di bidang *Germany Business and Tourism Management* (Kemendikbud, 2021)

c. Program *double degree*

Kualitas pendidikan dan pengajaran di Indonesia dapat meningkat dan setara dengan Universitas yang ada di Jerman dengan melaksanakannya program *double degree*. Hasil membuktikan bahwa beberapa mahasiswa yang mengikuti program *double degree* membuktikan kualitas yang dapat dibanggakan serta memperoleh respon positif dari rekan universitas Jerman. Beberapa universitas di Indonesia telah melakukan kerjasama *Double Degree* dengan universitas jerman, diantaranya Universitas Indonesia (UI) dengan Universitas Duisburg-Essen untuk program *Master Of*

Science (MSc) Informatika, dan Institut Teknologi Sepuluh November, Institut Teknologi Surabaya dengan Universitas *Applied Science Darmstadt* untuk Program MSc elektronika. Selain itu, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS-ITS) dengan *Berufsakademie Tettng* untuk Program Bachelor of Science Elektronika dan Mekatronika dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Technical Universitas Karlsruhe untuk bidang geofisika. Keterlibatan KBRI Berlin dalam pameran pendidikan yang diadakan di Gedung Kebudayaan Rusia (*Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur*) di Berlin. Pameran yang bertema *study World 2008* itu diikuti sebanyak 208 peserta, terdiri atas beberapa Universitas di Swedia, Finlandia, Estonia, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Austria, Inggris, dan Jerman, serta KBRI Berlin dan Kedutaan Besar Kanada. Pertunjukkan ini adalah ajang Internasional untuk studi, praktikum dan pendidikan akademis lanjutan, serta Indonesia menunjukkan profil perguruan tinggi yang dibuat Departemen Pendidikan Nasional (Antara, 2008).

d. Pertukaran Pelajar Indonesia-Jerman

Pada 2016, program pertukaran pelajar diawali dengan kunjungan 14 murid SMUN 1 Salatiga dan dua orang guru pendamping ke Sekolah Menengah Gymanasium Ohlstedt, Hamburg, dari tanggal 7 sampai dengan 27 September 2016. Sebaliknya, sebanyak 12

pelajar Gymnasium Ohlstedt akan berkunjung dan belajar di SMUN 1 Salatiga pada 29 September 2016.

E. Transaksi antar Negara

Transaksi antar negara Indonesia dan Jerman dilakukan untuk memenuhi tujuan kedua belah pihak diantara negara terlibat.

1. Kreditanstalt Fur Wiederaubau (KfW)

KfW merupakan institusi yang lebih fokus pada pendanaan pembangunan. Pertemuan antara Presiden Indonesia dengan Kanselir Jerman menyepakati bahwa Indonesia akan mencoba belajar dari Jerman mengenai bagaimana mengimplementasikan Pendidikan Vokasi. Kenapa vokasi, karena bagi Indonesia vokasi itu adalah salah satu jalan keluar untuk bisa mengatasi permasalahan *mismatch* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dan kebetulan dari pengamatan di Indonesia, Jerman merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam konteks kurikulum, maupun pendidikan di sekolah, namun yang lebih penting adalah maju dalam artian bisa meminimalisir pengangguran di Jerman. Juga bisa memberikan kesempatan kerja lebih banyak untuk angkatan kerjanya, terutama yang masih muda. Kemudian bisa mendapatkan langsung sesuai dengan kriteria hidup layak di Jerman (KfW Jerman, 2014).

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman sudah melakukan perjanjian melalui *Memorandum of Understanding* (MoU), bahwa Jerman siap untuk berkontribusi di Indonesia, baik dalam segi bantuan teknis

maupun dalam pembiayaan yang diperlukan, khususnya untuk pendidikan vokasi. Dan Indonesia sendiri telah menyiapkan *Grand Design* dari sistem pendidikan vokasi tersebut, yang tentunya mengambil tumpuan dari Jerman. Karena situasi pendidikan di Indonesia yang sedikit berbeda antara pendidikan di Jerman, maka tentunya perlu melakukan berbagai penyesuaian.

Selain Kementerian Pendidikan yang berwenang terhadap penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Politeknik terdapat juga Kementerian Tenaga Kerja yang terlibat. Yang dimana memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) atau *man power training* yang diharapkan juga ikut mempersingkat pengurangan pengangguran itu sendiri (Detik News, 2017).

2. Beasiswa Darmasiswa

Darmasiswa adalah beasiswa yang didistribusikan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya untuk para pelajar dari Jerman dan Negara-negara lain yang bekerjasama dengan Negara Indonesia. Fokus utama program beasiswa Darmasiswa ialah mempublikasikan budaya Indonesia terhadap masyarakat Internasional, melalui program beasiswa ini, peserta dapat menggeluti pengetahuan mereka tentang bahasa dan budaya Indonesia (Konsulat Jenderal RI).

Dalam upaya penambahan beasiswa dan dana untuk pelajar dari dua Negara melalui DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) dan

Beasiswa Darmasiswa. Hasil dari pemberian beasiswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah
2008	18
2009	6
2010	10
2011	19
2012	19
2013	12
2014	13
2015	17

Sumber: Kemendikbud, 2015.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, disimpulkan bahwa Indonesia dan Jerman melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan vokasi di masing-masing negara. Indonesia dan Jerman harus memiliki strategi yang kuat agar dapat melakukan kerjasama yang baik. Strategi yang dilakukan Indonesia dan Jerman dalam keberhasilan Deklarasi Jakarta pada bidang pendidikan dan vokasi, yaitu:

Pertama, strategi kerjasama dilihat dari pandangan dua atau lebih kepentingan. Pada konsep ini, Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama *deutsche gesellschaft fur internationale zusammenarbeit gmbh* (GIZ) serta kerjasama bahasa, seni dan budaya.

Kedua, strategi kerjasama dilihat dari pandangan atau harapan dari suatu negara. Pada konsep ini, Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama berdasarkan pandangan atau harapan dari suatu negara dalam hal ini bahwa kebijakan yang diputuskan berdasarkan kerjasama Internasional Jerman-Indonesia akan membantu masing-masing negara dalam mencapai kepentingannya, terdiri dari kerjasama pendidikan vokasi serta bidang riset dan pendidikan.

Ketiga, strategi kerjasama dilihat dari persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara. Pada konsep ini, Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama berdasarkan terjalannya persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau yakni antara Indonesia-Jerman dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Beberapa program dari berbagai organisasi kerjasama pembangunan dianggap sangat penting karena ada sinergi dan beberapa persamaan dengan bidang riset dan pengembangan, antara lain khususnya *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit* (GTZ) dan *Centrum fur Internatinal Migration und Entwicklung* (CIM).

Keempat, strategi kerjasama dilihat dari aturan resmi atau tidak resmi. Pada konsep ini, Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama berdasarkan aturan resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan bersama antar kedua negara, dalam hal ini Indonesia dan Jerman, yaitu kerjasama teknologi indonesia *cultural day* dengan kampus jerman yang terdiri dari program *double degree* dan pertukaran pelajar Indonesia-Jerman.

Keima, strategi kerjasama dilihat dari transaksi antar negara. Pada konsep ini, Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama untuk memenuhi tujuan kedua belah pihak diantara negara, yaitu *kreditanstalt fur wiederaubau* (KfW) dan beasiswa darmasiswa.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan penulis mengenai penelitian-penelitian lebih lanjut yang mungkin akan dilakukan mengenai fokus penelitian ini. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya menggali lebih jauh lagi mengenai kerjasama internasional Indonesia-Jerman tidak hanya di bidang pendidikan dan vokasi akan tetapi di semua bidang agar dapat dilihat secara langsung perkembangan dan keberhasilan dari kerjasama yang dilakukan. Kerjasama internasional antara Jerman dan Indonesia di berbagai bidang menjadi kunci kerjasama Internasional yang baik. Selain itu, belum juga diteliti fenomena-fenomena lebih dalam yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama antara Indonesia dan Jerman sehingga dapat menjadi kerjasama internasional yang berhasil mengembangkan masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alwasilah, Chaedar. (2008). *Filsafat Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Bakry, D. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok, Indonesia: Kencana.
- Getteng. A.R. (2011). *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Yogyakarta: Grahaguru.
- Dougherty & Pfaltzgraff. (1986). *Cuountending Theories of International Relation*. New York: Harper & Row.
- Hanrieder, W. (1971). *Comparative Foreign Policy Theoretical*, David Mc KAY Company In: Newyork.
- Holsti, K. J. (1992). *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Holsti, K. J. (1995). *International Politik: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, Inc.
- Kusumaatmadja, M. (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini: Kumpulan Karangan dan Pidato*. Jakarta: Alumni.
- Kusumahamidjodjo, B. (1983). *Politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini: Kumpulan karangan dan pidato*. Bandung: Alumni.
- Mas' oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Moergenthau, H. J., & Thompson, K. W. (1990). *Politik antar negara vol. 3*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Plano, J. C., & Olton, R. (1982). *The Internasional Relations Dictionary, Third Edition*. Santa Barbara: Western Michigan University.
- Pujiastuti, Y. S., Tamtomo, T. H., & Suparno, N. (2007) *IPS Terpadu untuk SMP dan MTs kelas IX semester 2*. Jakarta: Erlangga.
- Rudy, T. (2002). *Studi Strategi dalam Transformasi Sistem Informasi Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

- Rudy, T. M. (2002). *Hukum internasional I*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rudy, Teuku May. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*.
- Sofiah, L., Yudhistira, M. H., & Ardiansyah, R. (2009). *Seri Panduan Belajar dan Evaluasi Ekonomi*. Grasindo.
- Syah Nur, Agustiar. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Phartania, I. W. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Perwita, D. A., & Yani, F. (2005). *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Yogyakarta: Pt. Pustaka Pelajar.
- Plano, J. C., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin

Dokumen

- Kementerian Luar Negeri Jerman (2021). *Hubungan bilateral*. <https://jakarta.diplo.de/id-id/themen/kultur/-/2002502>. Diakses tanggal 14 Desember 2021 pukul 17.04 WITA.
- Kementerian Luar Negeri RI (2012). *Joint declaration Indonesia-Germany*. <http://www.kemlu.go.id/Documents/Deklarasi/Jakarta%20Declaration.pdf>. Diakses tanggal 17 Juni 2021 pukul 19.05 WITA.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2018). *Sekilas hubungan bilateral Indoensia dan Jerman*. <https://kemlu.go.id/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu>. Diakses tanggal 14 Desember 2021 pukul 17.50 Wita
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2015). *German-Indonesia Development Co-operation Project Data Sheet*.

Jurnal

- Doughherty, J & Pfaltzgraff, R. (1997). *Contending Theoris*, (New York: Harper and Row Publisher.s

Isri, S. (2015). Konsep pendidikan Jerman dan Australia: Kajian komparatif dan aplikatif terhadap mutu pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 25-47.

Karomah, T. (2017). Kerjasama pertahanan Indonesia-Jerman melalui Deklarasi Jakarta tahun 2012-2016. *Jom FISIP*, 4(2), 1-15.

Smith, Michael, & Hocking, B. (1990). *World Politics: An Introducing to International Relations*. Harvester Wheatsirf.

Handbook

Rosenau J. N. (1976). "The Study of Foreign Policy" dalam James N. Rosenau, Gavin Boyd, and Kenneth Thompson (eds.). *World Politics: An introduction*. New York: Free Press,

Skripsi

Utama, D. (2016). *Diplomasi kebudayaan Jerman di Indonesia melalui Goethe-Institut tahun 2011-2015*. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=347786>. Diakses tanggal 16 Juni 2021 pukul 15.41 WITA.

Yarnis. (2015). Analisis implementasi deklarasi Jakarta 2012 antara Indonesia-Jerman dalam bidang transportasi, pendidikan, dan lingkungan (periode 2012-2014). *[Skripsi]*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Kristen Indonesia.

Website

Botschaft, D. (2012). *Pendidikan, kebudayaan, dan olahraga: Dari kedutaan besar Jerman Jakarta*. http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/07_20Kultur_20idn/0-Kultur.html. Diakses tanggal 16 Juni 2021 pukul 17.12 WITA.

Bintang, R. (2014). *Hubungan kerjasama internasional*. <http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html>

- Deklarasi Jakarta. (2012). Pendidikan Budaya, Kerjasama Bidang Pendidikan. Online: <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/kerjasama-bidang-pendidikan/>. Di akses tanggal 7 Januari 2022 pukul 20.21 WITA
- DAAD Indonesia. (2022). *Information for Indonesias Studi & Research in Germany*. Online. <https://daadjkt.org/site/daadjktmobile/organisasi-riset?url=https%3A%2F%2F> Di Akses pada tanggal 7 Januari 2022 Pukul 21.12 WITA.
- Kilas Balik Dunia Pendidikan di Indonesia. <https://www.prestasi-lief.org/index.php/id/peature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022, pukul 20.21 WITA)
- Kemenko Bidang Perekonomian RI. (2018). *Indonesia-Jerman Perkuat Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi*. Online. <https://uc.xyz/18xnc4?pub=link>. Diakses tanggal 25 Januari 2022 pukul 16.11 WITA
- Kedutaan Besar Republik Indoneisa. (2018). *Sekilas hubungan bilateral Indonesia dan Jerman*. Online: <https://kemlu.go.ig/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu>. Diakses tanggal 1 Desember 2021 pukul 16.26 WITA
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2015). Data Beasiswa Darmasiswa Indonesia di Jerman. <https://uc.xyz/177ODU?pub=link> Diakses tanggal 8 Januari 2022 Pukul 20.32 WITA
- Konsulat Jenderal RI. Kerjasama Bidang Pendidikan. <https://uc.xyz/177Xc4?pub=link>. Diakses tanggal 7 Januari 2022 Pukul 23.11 WITA
- Jerman-Indonesia Hubungan Bilateral. (2016). *Jerman dan Indonesia Hubungan Bilateral*. Online. <https://uc.xyz/18xsAA?pub=link>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 Pukul 22.23 WITA
- Sayekti. S. (2018). *Kerjasama Bilateral Indonesia Jerman dalam Pendidikan Vokasi*. <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/giz->

kerjasama-bilateral-indonesia-jerman-dalam-pendidivokasi-sangat-menjanjikan. Diakses tanggal 22 Juni 2021 Pukul 14.25 WITA.

Voaindonesia. (2012). Indonesia-Jerman Sepakati Deklarasi Jakarta. <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/indonesia-jerman-sepakati-deklarasi-jakarta/1382416.html>. Di Akses tanggal 10 Januari 2022 pukul 14.11 WITA

Artikel

Detik News. (2017). *Jerman Siap Bantu Pendidikan Vokasi di Indonesia*. <https://uc.xyz/18LHwG?pub=link>. Diakses pada tanggal 25 Januari pukul 16.21 WITA.

Ferdiawan, Y. (2014). Kerjasama internasional makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis iternasional yang dibina oleh Bapak Dr. Wahyu Wibowo. https://academia.edu/6905196/KERJASAMA_INTERNASIONAL_MAKALAH_UNTUK_MEMENUHI_TUGAS_MATAKULIAH_Bisnis_Internasional_yang_dibina_oleh. Diakses tanggal 14 Desember 2021 pukul 15.12 WITA.

Idhom, A. M. (2012). *Indoneisa-Jerman peringati 60 tahun di Prambanan*. <http://www.dw.com/id/jakarta-berlin-arts-festival-digelar-di-jerman-bag1/a-15204879>. Diakses tanggal 16 Juni 2021 pukul 16.25 WITA.

Kontan.co.id. (2018). Kerjasama Bilateral Indonesia-Jerman dalam Bidang Pendidikan Vokasi. <https://uc.xyz/18LLxq?pub=link>. Diakses Pada Tanggal 25 Januari Pukul 16.45 WITA.

Rubianto, A. (2009). *Kerjasama Indonesia Jerman di Bidang Riset dan Pendidikan*. <https://arubi.wordpress.com/2008/12/22/3amp/>. Diaksese pada tanggal 2 Februari Pukul 10.36 WITA.

Wahyudi. R. (2019). Perbedaan Pendidikan di Indonesia dan Jerman Beserta Penerapannya. <https://uc.xyz/1aJd76?pub=link>. Diakses pada tanggal 3 maret Pukul 14.19 WITA.

Lestari. SA. (2021). Kerjasama Pendiidakn Vokasi Indoensia-Jerman, Hambatannya?, <https://uc.xyz/173Ev4?pub=link>. Diakses pada tanggal 3 maret Pukul 15.20 WITA.

Compas. Com. (2019). Kerjasama internasional, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-alasan-dan-tujuannya>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 11.22 wita

Compass.com. (2020). Kerjasama, pengertian, bentuk, dan faktor pendorong. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/070000869/kerja-sama-pengertian-bentuk-dan-faktor-pendorong>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 11.49 wita

Gramedia. Kerjasama internasional, pengertian, tujuan, manfaat, bentuk dan contoh. <https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 12.12 wita

Brainly. (2020). Yang mendorong kerjasama ekonomi internasional. <https://brainly.co.id/tugas/27534737>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 12.30 wita

BUSOWA